

PERUBAHAN RENSTRA

TAHUN 2021-2026



RENCANA STRATEGIS

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN GRESIK

TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.60 Telp (031) 3975454 Fax (031) 3975454

Website : <http://www.gresikkab.go.id> email : diskominfo@gresikkab.go.id

G R E S I K 61121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 48 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK

- Menimbang** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 19 ayat (4) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No: 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 dengan Peraturan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);
20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
21. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.
22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I	: Pendahuluan
Bab II	: Gambaran Pelayanan SKPD
Bab III	: Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
Bab IV	: Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan
Bab V	: Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif
Bab VI	: Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD
Bab VII	: Penutup
Lampiran	

Pasal 2

Uraian Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdapat dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 27 DESEMBER 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK**



Dra. NINIK ASRUKIN, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 196503071997032003

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK**

NOMOR : 48 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 19 TAHUN
2022 TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2021 - 2026**

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR	iii
BAB I – PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II – GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
KABUPATEN GRESIK.....	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika	7
A. Rincian Tugas Dan Fungsi Kepala Dinas.....	7
B. Rincian Tugas Dan Fungsi Sekretariat	8
C. Rincian Tugas Dan Fungsi Bidang Statistik dan Informasi Publik.....	10
D. Rincian Tugas Dan Fungsi Bidang Teknologi dan Informatika.....	11
E. Rincian Tugas Dan Fungsi Bidang SPBE.....	12
F. Rincian Tugas Dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional	12
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi Dan Informatika	13
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika	16
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik	31
2.5 Faktor Kunci Keberhasilan	32
BAB III – ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS	
KOMUNIKASI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK.....	34
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	34
3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih....	34
3.3 Program Nawakrsa	39
3.3.1 Prioritas I Program Nawakarsa	39
3.3.2 Prioritas II Program Pembangunan Daerah	40
3.4 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	41
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	42
3.5.1 RTRW Kabupaten Gresik 2010 – 2030	42

3.5.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	42
3.6 Penentuan Isu-isu Strategis	43

BAB IV – VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN DINAS

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK	47
4.1 Visi dan Misi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik.....	47
4.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.....	48
4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik	54

BAB V – RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI,

INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN GRESIK.....	58
5.1 Rencana Program Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Gresik.....	58

BAB VI –INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	91
BAB VII – PENUTUP	104

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas komunikasi dan Informatika disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 3 (tiga) tahun mendatang. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas komunikasi dan Informatika Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026. Perubahan Renstra ini disusun menyesuaikan adanya Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik.

Perubahan Renstra Dinas komunikasi dan Informatika memuat capaian dari target tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, sub kegiatan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta kerangka pendanaan pembangunan infrastruktur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas komunikasi dan Informatika. Untuk itu Perubahan Renstra Dinas komunikasi dan Informatika Tahun merupakan dasar dalam menyusun berbagai dokumen perencanaan, pemrograman, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kinerja di lingkungan, antara lain RENJA, penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan LKjIP.

Dengan demikian, atas izin Allah SWT serta segala upaya dari segenap jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas komunikasi dan Informatika serta stakeholders terkait kami mengharapkan target sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas komunikasi dan Informatika ini dapat tercapai sehingga dapat mensukseskan program pembangunan Bupati Kabupaten Gresik.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK**



Dra. NINIK ASRIKIN, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 196503071997032003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Globalisasi, pandemi Covid-19 dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang teknologi komunikasi dan informasi telah mempengaruhi dan membawa implikasi terhadap perubahan dan pembaharuan kehidupan masyarakat khususnya di tahun 2021, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun hankam di Indonesia dan dunia. Sehingga peran informasi dan komunikasi dalam aspek kehidupan sekarang ini sangatlah penting, bahkan para futuristik sebagian besar mempunyai suatu kesepakatan bahwa satu kekuatan terpenting sebagai sumber kekuasaan masa depan adalah informasi data yang akurat. Selain itu perkembangan bidang teknologi komunikasi dan informasi memberikan dampak meningkatnya secara pesat peranan berbagai media komunikasi dan informasi sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi yang paling efektif. Kini masyarakat telah semakin memahami dan menyadari hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu, serta sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat sejalan dengan pengembangan demokratisasi sehingga terwujudnya akuntabilitas publik, transparansi dan *good governance*.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua perangkat daerah di Kabupaten Gresik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik, Diskominfo mempunyai tugas menangani urusan

komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dengan lebih efisien, efektif dan akuntabel, serta meningkatkan kinerja, hal ini karena sektor pengembangan teknologi informasi memberikan pengaruh besar dalam perekonomian di Kabupaten Gresik.

Penyusunan rencana strategis ini, digunakan sebagai acuan dalam upaya mewujudkan sistem pelayanan komunikasi dan informatika yang terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sehingga pembangunan sektor komunikasi dan informatika di Kabupaten Gresik dapat lebih optimal sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Keterkaitan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi dengan Dokumen Perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Gresik
2. Merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) / Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD
3. Sebagai dasar pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Program selama 5 tahun.

Perencanaan daerah juga harus disusun dengan memperhatikan keselarasan dan kesinambungan antara rencana pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah maupun jangka pendek yang bersifat tahunan, sehingga memiliki sinkronisasi dan harmonisasi yang tinggi. Penyusunan Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Gresik di samping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 meliputi :

1. Undang–undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri No: 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);
 21. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.
 22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik

23. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 - 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang rencana pembangunan yang ingin dicapai lima tahun ke depan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik adalah :

1. Membuat dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah/strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis, mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026, sehingga menjadi terarah dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja/RKT) bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik 2021-2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan**, berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Gambaran Pelayanan SKPD**, berisi Tugas, Fungsi dan struktur organisasi PD, Sumber Daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.
- Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi**, berisi Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan

SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV **Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan,** memuat tentang visi, misi, Tujuan dan Sasaran, strategi dan kebijakan, tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, strategi dan kebijakan Perangkat Daerah.

Bab V **Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif,**
berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Bab VI **Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD,**
berisi Indikator Kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupten Gresik.

Bab VII **Penutup.**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN GRESIK

2.2. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Kelembagaan dan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13) dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gresik dengan susunan organisasi terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Keuangan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Statistik dan Informasi Publik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Teknologi Dan Informatika, Terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang SPBE, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
6. UPT; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

A. Kepala Dinas

mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
2. pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
3. pelaksanaan pelayanan administrasi komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
4. pelaksanaan pengendalian kebijakan, pembinaan dan fasilitasi urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
5. pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. pelaksanaan pengoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;
- g. pengoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan

- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan ketatausahaan;
- b. mengelola tertib administrasi perkantoran, kepegawaian dan kearsipan;
- c. menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan dan perjalanan dinas pimpinan;
- f. melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
- b. mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
- c. mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
- d. melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan;
- e. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- f. melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan di lingkungan dinas;
- g. melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak lainnya; dan

- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik

Tugas :

Bidang Statistik dan Informasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik dan bidang komunikasi dan informatika, sub bidang pelayanan informasi dan komunikasi publik.

Fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan program di bidang Statistik dan Informasi Publik;
- b. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan norma standard prosedur dan metode pelaksanaan program di bidang statistik dan informasi publik;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik, pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
- d. pelaksanaan pelayanan teknis di bidang statistik, pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan pengelolaan informasi, opini dan aspirasi publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah di bidang statistik, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah;
- f. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang statistik, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang statistik, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah; dan

- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Kepala Bidang Teknologi dan Informatika

Tugas :

Bidang Teknologi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub bidang informatika dan persandian.

Fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang Teknologi dan Informatika;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang teknologi dan informatika;
- c. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, standard operasional dan prosedur, serta norma standard prosedur dan metode pengelolaan teknologi dan informatika;
- d. pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang infrastruktur Teknologi dan Informatika, integrasi dan informatika, integrasi sistem, keamanan informasi dan persandian;
- e. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan program dan kebijakan di bidang infrastruktur teknologi dan informatika, integrasi sistem, keamanan informasi dan persandian;
- f. pelaksanaan pengendalian infrastruktur teknologi dan informatika, integrasi sistem, keamanan informasi dan persandian;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi, informatika, integrasi sistem, keamanan informasi dan persandian; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

E. Kepala Bidang SPBE

Tugas :

Bidang SPBE dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan komunikasi dan informatika sub bidang aplikasi dan SPBE.

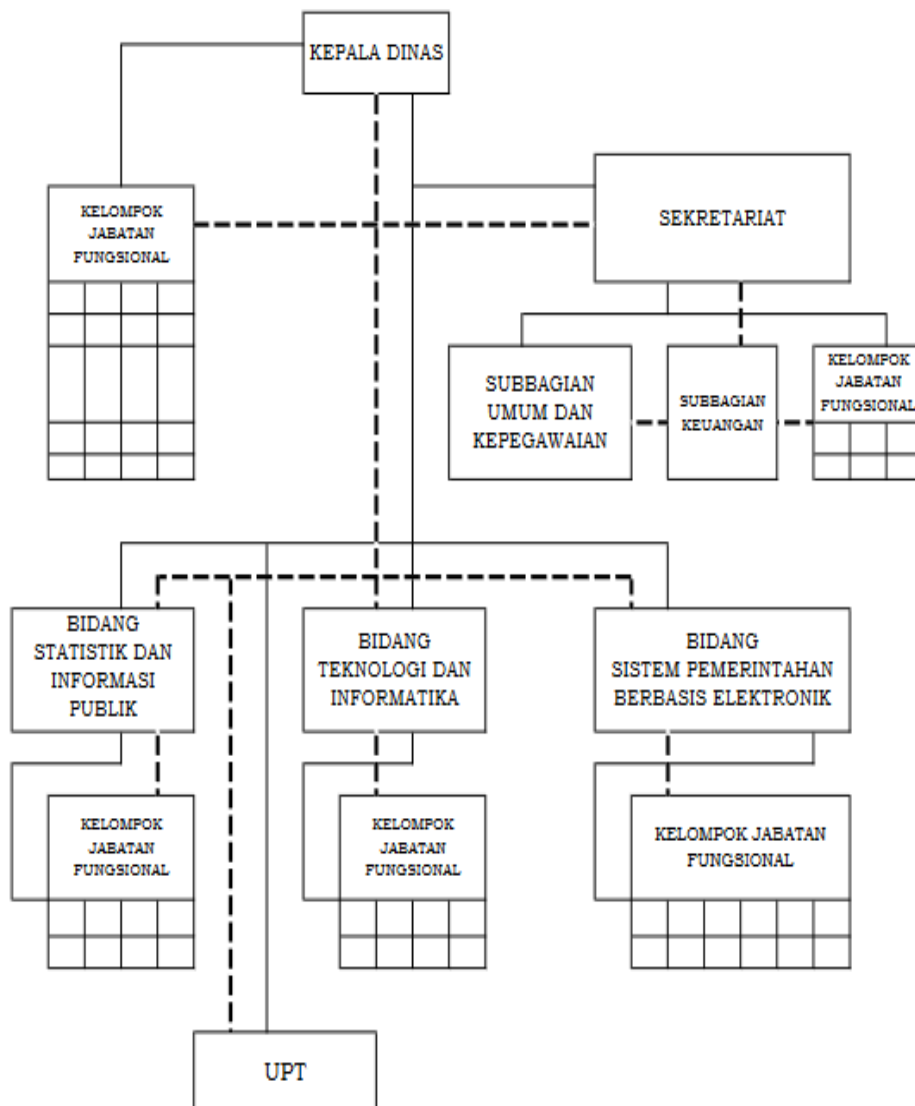
Fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program SPBE;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang aplikasi, layanan SPBE dan tata kelola SPBE;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pengendalian pelaksanaan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan Standar Operasional dan Prosedur aplikasi, layanan SPBE dan tata kelola SPBE;
- d. penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan aplikasi, layanan SPBE dan tata kelola SPBE;
- e. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pembangunan dan pengelolaan aplikasi, layanan SPBE dan tata kelola SPBE;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan dan pengelolaan aplikasi, layanan SPBE dan tata kelola SPBE; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Rincian Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/ atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing bidang.

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK



2.2. Sumber Daya dan Peningkatan Sarana Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (Human Resources) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

Komposisi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik secara keseluruhan berjumlah 63 orang, terdiri dari :

- 23 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- 8 orang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
- 19 orang berstatus Tenaga Harian Lepas (THL)
- 13 orang tenaga penyiar radio Suara Gresik dan call centre

Tabel 2.1

**Rekapitulasi data pegawai ASN Dinas Komunikasi dan Informatika
berdasarkan Jabatan, Golongan dan Jenis Kelamin**

No	NAMA UNIT KERJA	ESELON			GOLONGAN PNS & CPNS															Jenis Kelamin	
		II	III	IV dan Sub Koordinator	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c	I/b	I/a	L	P
1	Kepala Dinas	1			1																1
2	Sekretariat		1	3		1	1	2	1		2		1		1					3	6
3	Bidang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik		1	2			3				1									1	3
4	Bidang Sistem Statistik Dan Informasi Publik		1	2			1	2			3		3							5	4
5	Bidang Teknologi Dan Informatika		1	2				4			2		2							4	4
	JUMLAH	1	3	9	1	1	5	8	1		8		6		1					13	18

Pengembangan sumber daya manusia ditujukan bagi terwujudnya ASN Dinas Komunikasi dan Informatika yang kompeten, profesional, qualified, dan berintegritas melalui pengembangan karir dan kompetensi. Pengembangan difokuskan pada upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Persyaratan Jabatan. Upaya pencapaian pengembangan sumber daya manusia, meliputi :

- a. Keikutsertaan Pegawai ASN dalam mengikuti Diklat pengembangan diri sesuai dengan kualifikasi pendidikannya
- b. Keikutsertaan Pegawai ASN dalam mengikuti Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas keahliannya
- c. Keikutsertaan Pegawai ASN dalam mengikuti Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi untuk menunjang karir
- d. Keikutsertaan Pegawai ASN dalam mencoba kesempatan Beasiswa baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Pusat

Untuk kelancaran proses kinerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik, maka diperlukan aset Pemerintah Daerah karena perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

Tabel 2.3
Rekapitulasi Barang Milik Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

No. Urut	No. Akun	Uraian	Keadaan Per Tahun 2022		Keterangan
			Jumlah Barang	Nilai (Rp.)	
		ASET ATAP			
1.		Peralatan dan Mesin			
	0203	Alat Angkutan		1.172.800.239,99	
	0205	Alat Bengkel dan Alat Ukur		18.455.000,00	
	0206	Alat Kantor & Rumah Tangga		6.448.253.612,82	
	0207	Alat Studio dan Komunikasi		1.740.370.796,00	
2.		Gedung dan Bangunan			
	0311	Bangunan Gedung		233.636.500,00	
	0312	Monumen		3.750.000,00	
3.		Jalan, Irigasi dan Jaringan			
	0416	Jaringan		1.566.890.150,00	
		JUMLAH ASET TETAP			
4.		Aset Tetap Lainnya			
	0517	Buku/Perpustakaan		853.000,00	
	0518	Barang Bercorak Kebudayaan			
5.		Aset Tidak Berwujud			
	0704	Aset Tidak Berwujud		250.657.750,00	
		JUMLAH ASET LAINNYA			
		JUMLAH TOTAL		11.435.667.048,81	

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur bertujuan untuk mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana kantor dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional kantor, sehingga bermanfaat mendukung pelaksanaan kinerja aparatur. Selain itu, menjadikan wadah dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan guna meningkatkan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif dengan system kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang profesional dan akuntabel yang pada gilirannya dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dinas Komunikasi dan Informasi melalui :

1. Pengadaan peralatan gedung kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Informatika

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/ kegiatan. Mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui target rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika tidak terlepas dari Pagu Anggaran untuk menjalankan tugas dan fungsi Diskominfo dalam mencapai kinerja Program dan Kegiatan yang didapatkan sesuai Renja tahunan melalui RKPD Kabupaten Gresik. Berikut gambaran besaran pagu anggaran program dan kegiatan serta capaian kinerja dinas mulai tahun 2019 – 2021.

Tabel 2.4
Rekapitulasi Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran dari Tahun 2018 sampai Tahun 2021

No. Urut	Tahun	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian (%)
1.	2018	7.243.592.950,00	6.709.696.800,28	92,63
2.	2019	8.805.088.770,00	8.489.022.035,00	96,41
3.	2020	8.260.702.809,00	8.042.475.523,00	97,36
4.	2021	15.364,785.569,00	14.213.991.328,00	92,51

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja maka tingkat keberhasilan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik terdapat beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi dengan OPD terkait dalam setiap pelayanan seperti : penyediaan data, integrasi sistem aplikasi, penyediaan bandwidth internet, penyediaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi/Digital Signature, Sistem Informasi Desa (SID) DesaSIAP, Clustering Server.
2. Perlu dilaksanakan penanganan program kegiatan secara terpadu, sehingga prioritas dan kontinuitas kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
3. Sebagai Dinas Teknis dalam hal teknologi dan informatika juga mempunyai tugas sebagai pelayanan masyarakat dalam keterbukaan dan penyebaran informasi, keamanan informasi dari berita hoax, dll

Hasil pencapaian kinerja sasaran di sini adalah pencapaian kinerja Program dan Kegiatan pada periode Renstra tahun 2017–2021 dan secara umum dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan dengan rata-rata pencapaian 100%. Hasil pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 - 2020 disebutkan dalam **Tabel 2.5**.

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik
Tahun 2017-2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2017			2018			2019			2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Mewujudkan Kemudahan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Wilayah Desa/Kelurahan yang memiliki akses jaringan telekomunikasi yang berkualitas	100%	100%	100%	96,96% / 100%	96,96 % / 100%	100 %	96,96% / 100%	93,03 % / 100%	97,97%	96,96% / 100%	93,03 % / 100%	95,94% / 100%
2	Meningkatnya Penyelenggaraan E-Government	Persentase Sistem Informasi yang Terintegrasi	36,51%	36,70%	101%	38,10%	38,55 %	101 %	40,96%	42,17 %	102,17 %	42,17%	42,17 %	100%
		Persentase Layanan Publik berbasis elektronik	43%	46%	107%	57%	57%	100 %	70,21%	70,21 %	100%	85,11%	87,23 %	102,49 %
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi dan Statistik daerah	Pertumbuhan Kunjungan Website	5%	11,14%	223%	350.310 viewer	445.530 viewer	127 %	365.541 viewer	548.821 viewer	150%	380.772 viewer	424.104 viewer	111,38 %

Pada Tahun 2021 terdapat perubahan Renstra Tahun 2021 - 2026 sesuai Perda RPJMD nomor 10 Tahun 2021 sehingga indikator Kinerja Diskominfo mengalami perubahan dengan pencapaian kinerja pelayanan Tahun 2021 seperti berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Informasi Pemerintahan dan Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Informasi Pemerintahan dan Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan	1. Pertumbuhan pengunjung website	5% ~ 445309 dari 424104 viewers	6,97% ~ 453684 dari 424104 viewers	139,4%
	2. Pertumbuhan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan yang dipublikasikan	5% ~ 2541 dari 2.420 informasi	28,6% ~ 3112 dari 2.420 informasi	572%
	3. Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4	3	Tidak tercapai
	4. Persentase Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan	100% ~ 100 / 100 data	104% ~ 100 / 100 data	104%
	5. Persentase Data Sektoral (Layanan Perangkat Daerah) yang di Integrasikan	28.57% (2/7 data)	28.57% (2/7 data)	100%

Pada sasaran strategis 1 ini terdapat 5 indikator kinerja dengan capaian kinerja 4 indikator tercapai melebihi target dan 1 indikator yang tidak tercapai target yaitu pada indikator tingkat kematangan layanan pengaduan pelayanan publik, ketidak tercapaian indikator tingkat kematangan layanan pengaduan pelayanan publik tersebut berdasarkan penilaian/evaluasi indeks SPBE dikarenakan fasilitas pada aplikasi layanan pengaduan SP4N-LAPOR tidak dimanfaatkan secara maksimal sehingga menjadikan nilai tingkat kematangan pengaduan pada indeks SPBE tidak tercapai. Sasaran 1 ini dilaksanakan oleh Bidang Statistik dan Informasi Publik yang melaksanakan pelayanan pengelolaan informasi, opini dan aspirasi publik di bidang statistik, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di daerah, mencakup 2 urusan yaitu urusan komunikasi dan informatika dan urusan statistik, diantaranya :

➤ **Pengaduan SP4N-LAPOR!**

Layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap Penyelenggara pelayanan publik yang dibentuk untuk mendorong “*no wrong door policy*” untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun & jenis apapun disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang. Dinas Komunikasi dan Informatika atas nama Pemerintah daerah Kabupaten Gresik berperan melakukan monev pengelolaan pengaduan kepada seluruh Unit Kerja dengan dapat melibatkan APIP sebagai pengawas internal.

Dengan adanya layanan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi ini dapat memberikan fungsi dan manfaat :

- Mempercepat proses penyelesaian pengaduan melalui koordinasi dan kolaborasi antar instansi;
- Meningkatkan efisiensi sumber daya dalam berbagai pelaksanaan program, seperti penguatan kapasitas, komunikasi dan *public engagement*;
- Meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan melalui supervisi yang jelas dan terukur;
- Melaksanakan program bersama bagi instansi pemerintah yang berada dalam sebuah simpul (*hub*).

Diagram gambaran pengelolaan pengaduan SP4N-LAPOR di Kabupaten Gresik dari tahun 2020 sampai tahun 2022





Pengaduan **SP4N-LAPOR!** dapat dilakukan melalui beberapa kanal :

- Social Media → Twitter, Line, Telegram, dan Facebook
- SMS → dapat juga menggunakan prefix seperti: JATIM (Spasi) Aduan
- Android → SP4N LAPOR! untuk pelapor dan Instansi Pengelola LAPOR! untuk Admin
- IOS → SP4N LAPOR! untuk pelapor dan Instansi Pengelola LAPOR! untuk Admin
- Website → Kanal yang paling direkomendasikan untuk dikelola

Dalam hal layan publik yang bersifat pengaduan ini Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan inovasi dengan Membangun Akas 112 panggilan darurat, Layanan panggilan darurat 24 jam yg dikolaborasikan dengan layanan publik LAPORSP4N! dan Radio Suara Gresik, melibatkan unsur Kepolisian, Pemadam kebakaran, puskesmas dan rumah sakit, melalui nada tunggal panggilan darurat 112 gratis

➤ **Satu Data Kab. Gresik**

Dalam Urusan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika membangun sistem Satu Data rujukan terpadu dalam satu portal dan dapat diakses oleh semua untuk menciptakan transparansi dengan mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Produsen Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Gresik (one data, one portal, open access). Melakukan pengisian data pada Aplikasi

Sistem Input Satu Data pada Link : isd.gresikkab.go.id bersama Forum Satu Data Kab. Gresik yang terdiri dari :

- Bappeda (sebagai koordinator)
- Dinas Komunikasi dan Informatika Sebagai Waditada
 - Sekretaris Dinas masing-masing OPD sebagai Validator Data OPD (Walidata Pendukung) :
 - Sebagai Produsen Data / Operator (OPD)
OPD Prioritas : Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas KBPPPA, Dinas Tenaga Kerja, Dinas PMD, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, dan Dinas PUTR

OPD lainnya

Data yang dihasilkan Produsen Data harus:

- Memenuhi STANDAR DATA
- Memiliki METADATA
- Memenuhi kaidah INTEROPERABILITAS DATA
- Menggunakan KODE REFERENSI dan/atau DATA INDUK

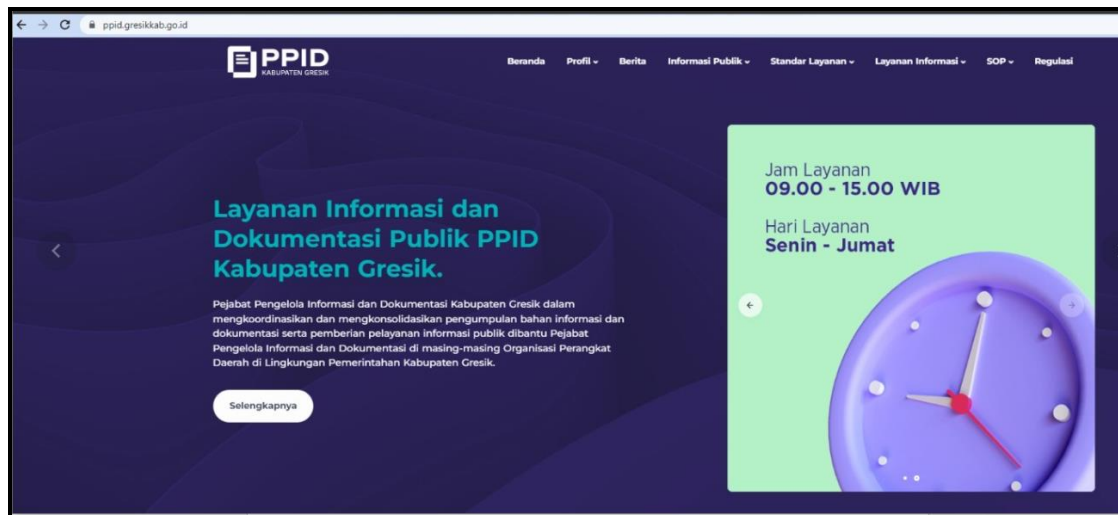
Tantangan Satu Data di Daerah :

- Kesiapan infrastruktur dan manajemen data yang belum dilakukan
- Belum dilakukannya integrasi data dan masih terdapat permasalahan egosektoral yang memungkinkan tersedianya data yang berbeda antar instansi
- Munculnya keraguan antar instansi untuk berbagi akses data
- Kurangnya SDM yang mampu mengelola data dengan baik
- Terdapat beragam referensi dan standar data
- Pemahaman kebijakan Satu Data belum dipahami secara merata

➤ **Keterbukaan Informasi Publik**

Indikator Kinerja Pelayanan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan yang dipublikasikan pada sasaran 1 ini berarti terfasilitasinya permohonan informasi dan dokumentasi publik yang berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan informasi pemerintah Kabupaten Gresik sehingga informasi publik dapat tersampaikan kepada masyarakat sesuai kebutuhan dalam mendukung program pemerintah.

Masyarakat dapat secara langsung dapat mengakses dan mendapatkan informasi dan dokumentasi publik melalui Website PPID dengan alamat **ppid.gresikkab.go.id**. Pengajuan permohonan informasi dan dokumentasi publik tersebut difasilitasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggungjawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi public.



Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI), keamanan sistem elektronik, dan data terintegrasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI), keamanan sistem elektronik, dan data terintegrasi	1. Presentase perangkat daerah dan kelurahan yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah	97% (46 OPD dan 26 kelurahan)	97% (46 OPD dan 26 kelurahan)	100%
	2. Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2	2	Tercapai, sesuai target
	3. Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	4	Tercapai, melampaui target
	4. Tingkat Kematangan penggunaan Sistem Penghubung Layanan	2	2	Tercapai, sesuai target
	5. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1	1	
	6. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1	1	
	7. Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	2	2	
	8. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1	1	

Pada sasaran 2 ini mencakup 2 urusan yaitu urusan Komunikasi dan informatika (bidang TIK) dan urusan persandian. Indikator kinerja yang dicapai diperoleh dari evaluasi penilaian indeks SPBE yang semua targetnya dapat tercapai dengan bagus bahkan ada yang melampaui target. Selain indikator tingkat kematangan dari indeks SPBE terdapat indikator kinerja tentang layanan infrastruktur teknologi informatika penyediaan bandwidth internet.

➤ **Layanan Bandwith/Jaringan Internet**

Salah satu layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI) dalam sasaran strategis adalah layanan jaringan kebutuhan bandwidth internet untuk koneksi jaringan intra pemerintah Kabupaten Gresik dan beberapa kelurahan di Kabupaten Gresik. Besaran alokasi penggunaan Bandwith sebesar :

- Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik 700 Mbps : IP Transit 350 Mbps dan Backup IP Transit 350 Mbps
- Di Kecamatan : Jaringan Metro 15 Mbps & Internet Broadband 20 Mbps
- Kelurahan : Menggunakan GPON 6 Mbps

Layanan Internet yang di dukung :

- web browsing
- akses email
- upload dan download file
- administrasi sistem informasi
- akses sistem berbasis cloud
- Video Conference
- chatting
- streaming video

Layanan Internet yang di blokir :

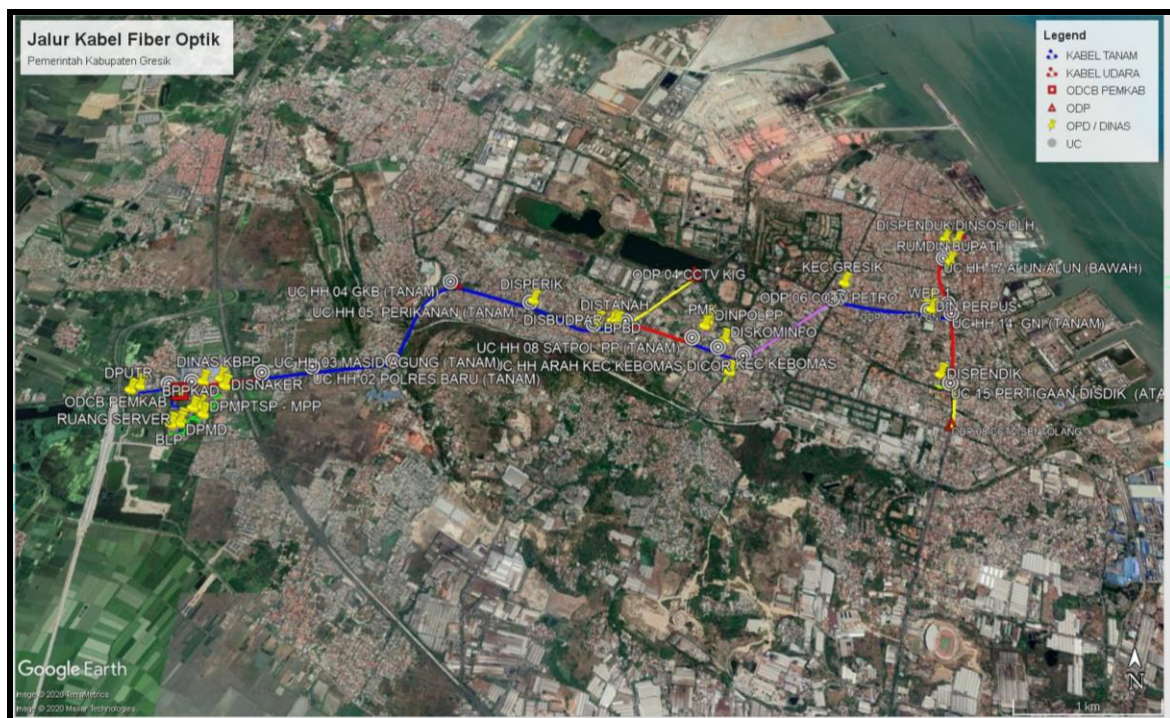
- web/konten yang berhubungan dengan konten pornografi

Jenis – Jenis Koneksi Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Gresik adalah :

- Jaringan Fiber Optik = Terkoneksi di semua Kantor Pemkab dan OPD di Kabupaten Gresik
- METRO = Terkoneksi di 16 Kecamatan di Kabupaten Gresik

- GIPON = Terkoneksi di 26 Kelurahan di Kec Gresik dan Manyar
- Dial VPN = Terkoneksi di 2 Kecamatan di Kepulauan Bawean

Dalam koneksi jaringan intra Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut menggunakan jaringan Fiber Optik dengan Distribusi Fiber Optik Menuju OPD / Dinas, koneksi terpusat pada Switch distribusi yang dikoneksikan menggunakan Fiber Optik. Kapasitas transmisi yang dapat digunakan sebesar 1Gbps hingga 10Gbps. Terdapat beberapa CCTV yang dikoneksikan menggunakan media fiber optic dengan kecepatan transmisi 100Mbps. Jalur kabel Fiber Optik Pemerintah Kabupaten Gresik melalui jalur kabel tanam dan kabel udara. Berikut adalah gambaran jalur kabel Fiber Optik :



Sedangkan untuk koneksi di kelurahan melalui jalur kabel udara dengan gambaran jalur kabel FO sebagai berikut :



Selain menyediakan layanan jaringan kebutuhan bandwidth internet untuk koneksi jaringan intra pemerintah Kabupaten Gresik dan beberapa kelurahan di Kabupaten Gresik, Dinas Komunikasi dan Informatika juga menyediakan 24 area hotspot/wifi di area publik, diantaranya : Area Pemda, Pendopo Kecamatan, Alun - alun Gresik Bag. Tengah, WEP, Perpustakaan Daerah, Kopi Sampah, Taman GKB, Bunderan GKB, Pengadilan Agama, Masjid Agung, Kantor PMI, Kantor PWI, Kantor KWG, dll

➤ **Sistem Penghubung Layanan / Integrasi Sistem**

Integrasi Sistem merupakan sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan dua sistem atau lebih. Dalam menghubungkan dua sistem atau lebih Dinas Komunikasi dan Informatika Gresik menggunakan aplikasi SIMANTRA. SIMANTRA Adalah Sistem Informasi Manajemen Integrasi Informasi dan Pertukaran Data.

Beberapa aplikasi yang memanfaatkan SIMANTRA adalah :

- a. SIPANTAS dengan SAP (Sistem Absensi Pegawai)
- b. SIMRS milik RSUD Ibnu sina
- c. SIPANTAS dengan E-Sakip
- d. SIKDA Dinkes dengan SIKDA Puskesmas-puskesmas

➤ **GresikKab-CSIRT**

Dalam hal keamanan informasi berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi dan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tim Tanggap Insiden Siber, untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah insiden serangan keamanan informasi di Kabupaten Gresik, maka dibutuhkan adanya tim tanggap insiden siber (GresikKab-CSIRT) untuk menghadapi ancaman serta penanganannya. GresikKab-CSIRT (computer security incident response team) adalah tim tanggap insiden siber yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dan akan bertugas menjamin keamanan siber, memberikan layanan serta penanganannya pada seluruh Aplikasi dan Server yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Dengan adanya GresikKab-CSIRT (computer security incident response team) dapat memberikan manfaat :

- e. Terwujudnya keamanan dan ketahanan siber di lingkungan pemerintah kabupaten gresik yang handal dan professional.
- f. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik di Pemerintah Daerah;
- g. meningkatkan keamanan informasi dan sistem elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- h. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah.

➤ **Digital Signature/ Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi**

Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi data lewat Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR Indonesia. sasaran yang ingin dicapai dalam penggunaan TTE adalah untuk seluruh Pejabat Eselon II (Kepala Dinas), Camat dan Kepala Desa di Kabupaten Gresik. di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Dengan penggunaan TTE tersertifikasi, memberikan beberapa manfaat :

- a. menjamin keutuhan, otentikasi dan nir penyangkalan Dokumen Elektronik di Pemerintah Daerah;

- b. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik di Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan keamanan informasi dan sistem elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- d. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap implementasi sistem elektronik di Pemerintah Daerah;
- e. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Progress capaian Digital Signature antara lain :

- Sudah melakukan pendaftaran sertifikat elektronik kepada 32 Kepala OPD dan sedang pada tahap konfirmasi
- Sertifikat elektronik yang sudah pada tahap konfirmasi dan selesai sebanyak 11 Kepala OPD
- Untuk saat ini aplikasi pada OPD yang menggunakan Digital Signature :
 - Go Putar (Dinas PUPR)
 - E-office (Dinas Komunikasi dan Informatika)
 - SiCantik (DPMPTSP)

Sasaran 3 : Meningkatnya Tingkat Kematangan kapabilitas proses SPBE

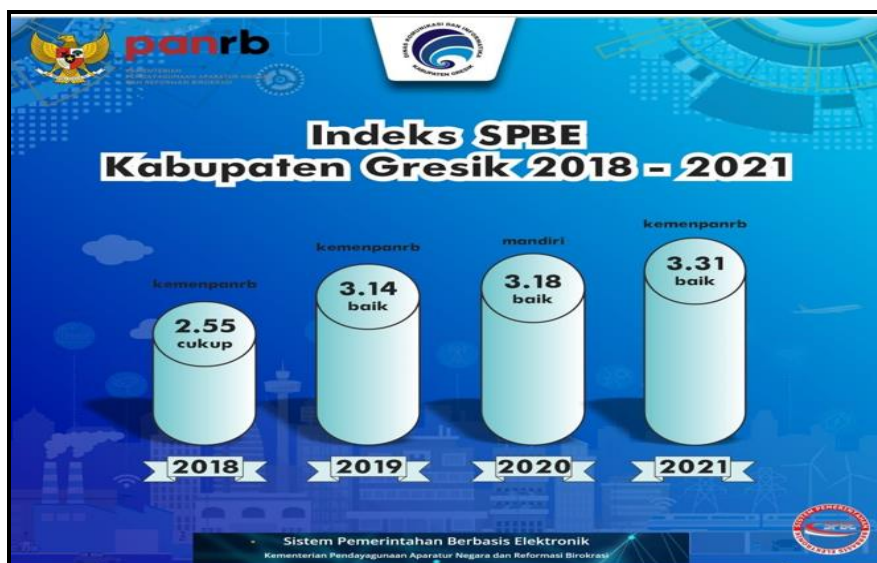
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Tingkat Kematangan kapabilitas proses SPBE	1. Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE	4	4	Tercapai, sesuai target
	2. Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3	3	Tercapai, sesuai target
	3. Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1	3	Tercapai, melampaui target
	4. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1	2	Tercapai, melampaui target

Indikator Kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik sebagian besar merupakan turunan dari Indeks SPBE, itu dikarenakan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sekretariat dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Gresik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kemudian diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik maka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dipandang sebagai suatu optimasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam meningkatkan kepuasan publik atas kualitas layanan Pemerintah, mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan keterlibatan dan kepercayaan publik, serta meningkatkan kinerja pelayanan public.

Penerapan SPBE ini berkaitan erat dengan konsep *smart city* yang merupakan upaya-upaya inovatif yang dilakukan ekosistem kota dalam mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas setempat. Dengan kata lain, SPBE merupakan katalis bagi terwujudnya kota cerdas.

Dalam mengukur tingkat keberhasilan capaian kemajuan, serta meningkatkan kualitas penerapan **SPBE** pada pemerintah daerah yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang berpedoman pada PermenPANRB No. 59 Tahun 2020. Didalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Indeks SPBE merupakan salah satu sasaran dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Tingkat capaian kemajuan Indeks SPBE dari tahun 2018 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan seperti digambarkan pada diagram berikut :

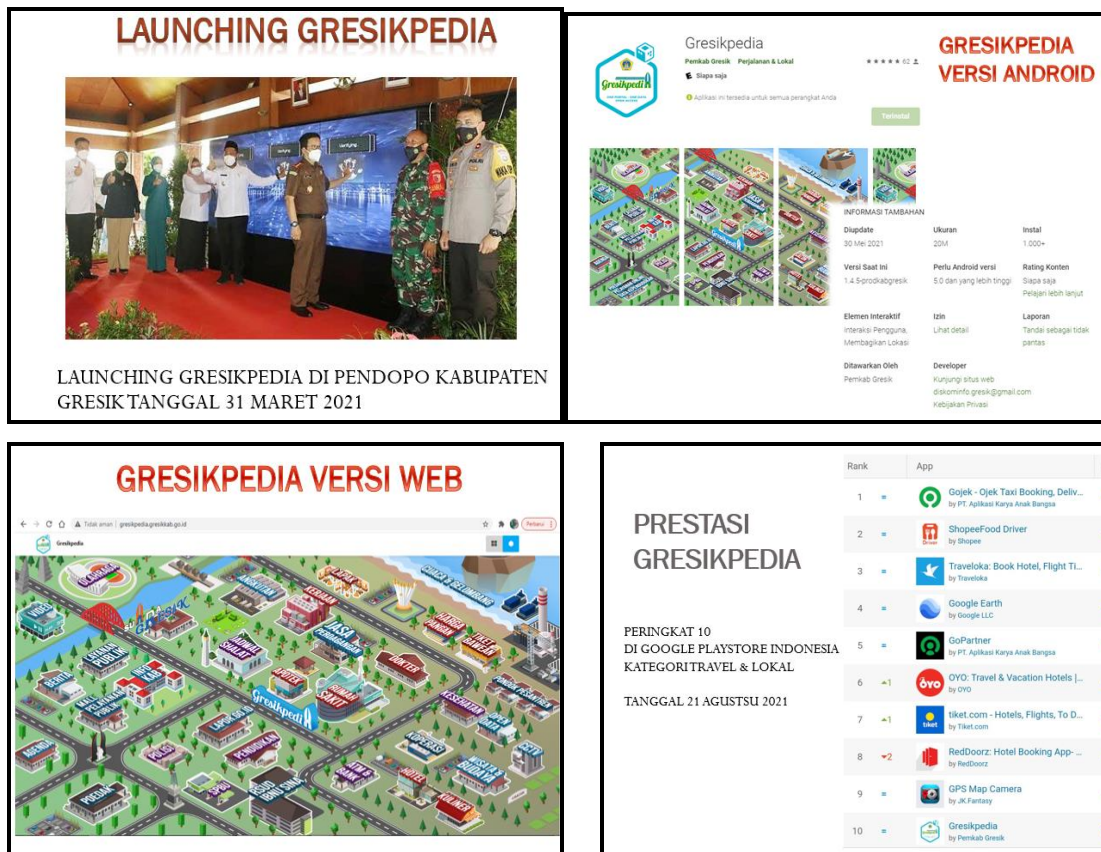


Salah satu Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui pengelolaan Aplikasi SPBE yang merupakan kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SPBE. Pengembangan SPBE Di Kabupaten Gresik terdapat 26 (dua puluh enam) Website layanan informasi publik dan 83 (delapan puluh tiga) Sistem Informasi / Aplikasi pada Layanan Publik Berbasis Elektronik. Dinas Komunikasi dan Informatika mengintegrasikan Layanan Publik Berbasis Elektronik dan Layanan Informasi Publik di dalam Satu Platform dengan nama **GRESIKPEDIA** berkonsep **One Data, One Portal, Open Access** yang dapat diakses melalui android (Gresikpedia di Playstore) dan website dengan alamat : <https://gresikpedia.gresikkab.go.id/>

Terbentuknya Aplikasi **GRESIKPEDIA** memberikan beberapa manfaat :

1. Sebagai Wadah Integrasi Layanan Publik Berbasis Elektronik dan Layanan Informasi Publik seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik
2. Memberikan kemudahan akses Masyarakat dan Swasata akan Layanan Publik Berbasis Elektronik dan Layanan Informasi Publik yang telah disediakan oleh OPD (G2C dan G2B);
3. Berbagai pakai data dan informasi antar Bisnis / Swasta (B2B), Masyarakat (C2C);
4. Dapat diakses melalui smartphone berbasis Android tanpa khawatir akan alamat palsu, aplikasi palsu, phising dan cyber crime lainnya yang menjadi potensi di dalam dunia internet

Didalam aplikasi **GRESIKPEDIA** pada tahun 2021 sampai awal tahun 2022 tercatat sudah didownload aplikasi di Google Playstore lebih dari 50.000 download yang memuat 12 Jenis Layanan Publik Berbasis Elektronik terintegrasi dan 20 Website dan Media Sosial Layanan Informasi Publik serta Data Obyek Potensi daerah sebanyak 10 Jenis.



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik

Berdasarkan pembahasan terhadap kinerja layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik lima tahun terakhir dapat diketahui tantangan maupun peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik lima tahun ke depan.

Adapun tantangan dalam pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik antara lain :

- Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik, baik dampak positif maupun dampak negatif sehingga perlu dilakukan sosialisasi terkait hal tersebut.
- Ketersediaan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi yang masih sangat terbatas dan kurang merata di wilayah pemerintahan Kabupaten Gresik.
- Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap teknologi, informasi dan komunikasi, sehingga masih terjadi kesenjangan pemahaman informasi di masyarakat.
- Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur Pemerintah Daerah.

- e. Belum optimalnya keamanan pengelolaan data informasi.
- f. Terbatasnya kecepatan koneksi internet di wilayah pemerintahan kabupaten Gresik.
- g. Kurangnya minat masyarakat untuk mempelajari pengetahuan IT.

Sedangkan peluang yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dalam pengembangan pelayanan antara lain :

- a. Komitmen kepala daerah untuk mendukung program yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.
- b. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- c. Tersedianya media teknologi informasi dan komunikasi untuk didayagunakan.
- d. Kebutuhan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Meningkatnya sistem keamanan informasi bersifat rahasia yang memanfaatkan teknologi informasi.
- f. Pesatnya perkembangan teknologi memungkinkan segera terciptanya Program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2.5. Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Faktor-faktor kunci keberhasilan (critical success factors) merupakan faktor-faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi yang mencakup bidang atau aspek dari misi di mana di dalamnya sangat tergantung pada keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Faktor-faktor kunci keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak potensialnya dan kemudian dilanjutkan dengan penentuan skala prioritas. Dengan menggunakan faktor-faktor inilah diharapkan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik akan dapat diupayakan secara maksimal guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk dicapai pada akhir tahun 2022 yang akan datang. Dengan mempergunakan pendekatan analisis SWOT, faktor-faktor kunci keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mendayagunakan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang ada untuk meningkatkan kualitas pekerjaan yang kurang optimal.
2. Mendayagunakan pihak ketiga/para tenaga ahli untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam meningkatkan pencapaian kinerja Dinas
3. Mengoptimalkan koordinasi dan memanfaatkan peraturan/regulasi yang ada guna meningkatkan produktifitas kerja
4. Meningkatkan hubungan kerja antar dinas dan stakeholder

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DISKOMINFO KABUPATEN GRESIK

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Gresik yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian. Diskominfo Kabupaten Gresik melaksanakan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (penggunaan teknologi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat, urusan bisnis serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan)/*Smart City*. Sejalan dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang menjadi hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Masih belum optimalnya cakupan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi
2. Terbatasnya sumberdaya manusia yang terampil dan profesional di bidang IT
3. Belum terintegrasinya sistem informasi dan database perangkat daerah
4. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat
5. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK
6. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur TIK, terutama infrastruktur berbasis FO

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi Pemerintah Kabupaten Gresik untuk periode tahun 2021–2026 adalah :

**“Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing
dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”**

Secara filosofis, visi Kabupaten Gresik tersebut mengandung makna sebagaimana disajikan dalam pokok-pokok visi pembangunan sebagaimana berikut :

1. Gresik yang lebih Mandiri :

Kemandirian dalam konteks kedaerahan merupakan kehidupan bermasyarakat yang menjadi salah satu tujuan yang selalu ingin dicapai setiap daerah. Mandiri ialah sebuah bentuk kemampuan yang dapat mengoptimalkan apa yang dimiliki (sumberdaya) dan mengembangkannya (potensi) sehingga dapat menjadi sebuah bentuk kekuatan daerah yang mampu berkompetisi serta beradaptasi dengan perubahan jaman. Maka baik pemerintah dan masyarakat Gresik secara kolektif kolegal mampu memenuhi kewajibannya baik domestik maupun internasional. Adapun kemandirian ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Kemandirian Ekonomi dalam hal ini adalah dengan memiliki sumber daya manusia yang kreatif, terampil dan kompetitif, yang kemudian dikolaborasikan dengan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pengelolaan sumber daya alam, tata kelola pemerintahan, dan pengambilan keputusan sehingga mewujudkan kemandirian daerah.

2. Gresik yang Sejahtera

Sejahtera adalah suatu kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Kehidupan yang layak dengan terpenuhinya hak-hak masyarakat, yang aman dari rasa kekhawatiran akan potensi-potensi ancaman pada masyarakat seperti terorisme atau potensi bencana alam, memperoleh pekerjaan yang layak serta mampu mendapatkan akses di dunia usaha, dan tidak tersisihkan dalam kehidupan sosial. Adalah satu kesatuan masyarakat dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Gresik.

3. Gresik yang Berdaya Saing

Daya saing sangat berhubungan dengan kemampuan dan kapasitas pembangunan sebuah daerah. Strategi pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi daya saing sebuah daerah yang nantinya untuk menunjang peningkatan di segala sektor. Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan

antar wilayah utara dan selatan, kota dan desa serta konektivitas dengan pulau bawean. Salah satu fokus dari pembangunan ini adalah pada pembangunan antar wilayah produksi dengan wilayah distribusi. Serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang kemudahan untuk mengakses segala kebutuhan pokok masyarakat secara inklusif, baik perempuan dan laki-laki, pada semua kelompok usia, termasuk kelompok rentan dan marginal, di semua wilayah baik di kota maupun kepulauan. Ada pula pembangunan infrastruktur konektivitas multimoda yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi seperti pada pembangunan fasilitas transportasi kereta api guna menunjang pembangunan di area GEBANGKERTASUSILA hingga transportasi laut antar pulau seperti pada pulau bawean. Ke depan pembangunan ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Gresik serta terciptanya tata kota yang modern, inovatif dan berkeadilan.

4. Gresik yang Berkemajuan

Berkemajuan disini terkait bahwa seluruh rangkaian pembangunan yang dilakukan di Gresik bertujuan untuk membawa warga Gresik menjadi warga yang unggul, berorientasi kedepan, memiliki sikap optimisme menatap masa depan dan memiliki kapasitas kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang tinggi serta pembangunan karakter. Untuk membentuk insan warga Gresik yang memiliki karakter orientasi kemajuan. Maka pemerintah wajib mewujudkan kemudahan dalam mengakses pendidikan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas serta mewujudkan pola pendidikan yang inovatif dan kolaboratif yang mampu memunculkan warga yang memiliki kompetensi individual yang baik dan memiliki kemampuan untuk dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam mendorong kemajuan serta memiliki karakter yang kuat.

5. Gresik yang Berlandaskan Akhlakul Karimah

Seluruh dimensi visi pembangunan Gresik diatas dilandasi oleh Akhlakul Karimah. Akhlakul Karimah atau akhlak yang mulia adalah keadaan mentalitas warga Gresik memiliki keadaban sosial, karakter luhur, kesalehan sosial. Pemerintah Gresik bertanggung jawab untuk membawa masyarakat memiliki akhlak yang mulia atau akhlakul karimah berbasis pada nilai-nilai budaya dan keagamaan. Akhlak ini tidak hanya menegaskan tentang karakter manusia Gresik, namun juga menjadi jiwa dalam seluruh aspek mulai dari pelayanan

publik, pendekatan pembangunan hingga kebijakan secara umum. Melalui pembangunan karakter manusia yang berakhlakul karimah bahwa pembangunan di Gresik tidak hanya mengejar pemenuhan material namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas warga yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Dengan akhlakul karimah maka orientasi pembangunan di Gresik mendorong untuk membangun warga yang memiliki solidaritas yang tinggi, menghormati keragaman dan perduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter. Didalam pemerintahan penerapan Akhlakul

Kharimah juga dijadikan prinsip yang akan mewujudkan pemerintahan yang bersih, anti korupsi serta tanggap dan akuntabel. Hal ini bertujuan agar setiap warga dan juga pemerintah memiliki pandangan tujuan yang sama dalam segi pembangunan karakter.

Pernyataan visi di atas, kemudian dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi sebagai berikut :

- 1) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif
- 2) Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota
- (3) Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah
- (4) Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah
- (5) Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026, Tugas dan Fungsi Diskominfo termasuk dalam **Misi ke-1** yaitu *Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel serta mewujudkan Kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif*. Dalam rangka pencapaian misi pertama di atas maka ditetapkan **Tujuan ke-1** yaitu *“Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas berdasarkan Good and Clean Governance”*, tujuan ke-1 tersebut dijabarkan dalam sasaran pembangunan **Sasaran ke-1** sebagai berikut

: “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Akuntabel dengan Pelayanan Publik yang Berkualitas Berbasis Pemanfaatan Teknologi Informasi” dengan indikator kinerja yang diampuh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah *Indeks Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik*. Penyelarasan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan serta penetapan indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dijabarkan ke dalam rumusan sebagaimana berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

No	Misi RPJMD	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Serta Mewujudkan Kepemimpinan Yang Inovatif dan Kolaboratif	Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan <i>Good and Clean Governance</i>	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Indeks Inovasi Daerah

Tabel 3.2
Penetapan Indikator Kinerja Tujuan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

No	Misi RPJMD	Tujuan	No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal	Target Indikator						Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Menciptakan Tata Kelola	Menghadirkan Tata Kelola	S.1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan	2,55	3,01	3,19	3,65	3,86	4,03	4,13	4,13
	Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Serta Mewujudkan Kepemimpinan Yang Inovatif dan Kolaboratif	Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan <i>Good and Clean Governance</i>		yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Berbasis Elektronik								

Indikator kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dijabarkan dalam rumusan sebagai berikut :

1. Persentase Pengaduan Pelayanan Publik Daerah yang diselesaikan
2. Jumlah informasi dan dokumentasi publik yang disediakan
3. Jumlah Konten Positif Pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan
4. Persentase Ketersediaan Layanan Pusat Data
5. Persentase pelaksanaan kebijakan SPBE yang dievaluasi
6. Persentase aplikasi yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah
7. Jumlah Rekomendasi Kebijakan data yang disediakan
8. Jumlah Aplikasi yang sudah menerapkan keamanan informasi

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang Program Pembangunan Daerah Diskominfo yaitu :

1. Program Aplikasi Informatika
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

3.3. Program Nawakarsa

3.3.1. Prioritas I Program Nawakarsa

Dalam rumusan Nawa Karsa atau 9 (Sembilan) navigasi perubahan program prioritas yang terdiri dari Gresik Akas, Gresik Seger, Gresik Mapan, Gresik Agropolitan, Gema Karya, Gresik Cerdas, Gresik Sehati, Gresik Barokah, dan Gresik Lestari merupakan sebuah strategi pembangunan Kabupaten Gresik Baru untuk mendukung realisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Prioritas Nawakarsa adalah bagian dari Program Pembangunan Daerah dan dijabarkan dalam Kegiatan, dan/atau Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Penjabaran Nawakarsa yang diampuh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dirumuskan dalam output kunci sebagaimana berikut :

Tabel 3.3
Program Nawakarsa Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

No.	Nawa Karsa	Output Kunci	Program	Perangkat Daerah
1.	Gresik Akas			
		Gresikpedia	Program Aplikasi Informatika	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Komunikasi dan Informatika
		Desa siap	Program Aplikasi Informatika	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Komunikasi dan Informatika
		Membangun sistem pengaduan sampai tingkat RT	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Komunikasi dan Informatika
2.	Gresik Seger			
		Gresik satya (One Data Kemiskinan Kabupaten Gresik)	Program Aplikasi Informatika	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Komunikasi dan Informatika
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Statistik
3.	Gresik Mapan			
		Gresik kota santri 4.0	Program Aplikasi Informatika	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Komunikasi dan Informatika

3.3.2. Prioritas II Program Pembangunan Daerah

Program Pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yang diampuh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dirumuskan sebagaimana berikut :

Tabel 3.4
Program Prioritas I Nawakarsa Dinas komunikasi dan Informatika

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
-1	-2
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
	Program Prioritas I Nawakarsa

3.4. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Permasalahan pelayanan Diskominfo Kabupaten Gresik berdasarkan sasaran renstra K/L beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya.

Tabel 3.5.
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD Provinsi/Kabupaten/Kota	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	- Mewujudkan kemudahan pemanfaatan teknologi informasi - Meningkatnya Penyelenggaraan SPBE - Meningkatnya kualitas Pelayanan informasi dan statistik daerah	- Masih terjadinya kesenjangan di bidang komunikasi sosial dan teknologi informasi di masyarakat khususnya antara desa dan kota - Belum terintegrasinya sistem informasi dan database perangkat daerah - Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam pemerintahan dan pelayanan publik	- Masih belum optimalnya cakupan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi - Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan profesional - Belum terintegrasinya sistem informasi dan database perangkat daerah - Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat - Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK - Belum optimalnya penyediaan infrastruktur TIK, terutama infrastruktur berbasis FO	- Komitmen kepala daerah untuk mendukung program bidang kominfo - Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik - Tersedianya media teknologi informasi dan komunikasi untuk didayagunakan. - Kebutuhan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

Untuk mewujudkan penyelenggaraan SPBE yang menjamin keterbukaan informasi dibutuhkan kinerja yang baik tidak hanya dari sisi aparat pemerintah, tetapi juga masyarakat, minimal dengan tingkat literasi TIK nasional 75%. Dengan tingkat literasi itu, pemanfaatan TIK untuk hal positif dan bermanfaat akan menunjang

keaktivitas dan daya saing bangsa di tingkat internasional. Dengan meningkatnya masyarakat yang melek TIK, akses masyarakat terhadap informasi publik akan meningkat.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kominfo pada dasarnya berfungsi sebagai penyebarluasan informasi melalui TIK pada 5 (lima) tahun ke depan yang merupakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat, sehingga perlu dibangun ke depan dalam skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pengembangan TIK.

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.5.1 RTRW Kabupaten Gresik 2010 – 2030

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 juga mengidentifikasi adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik 2010-2030 sebagaimana disampaikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomer 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2010-2030 yang diarahkan pada seluruh wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari 18 Kecamatan dengan 330 Desa dan 26 Kelurahan. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam koneksi jaringan intra Pemerintah Kabupaten Gresik menggunakan jaringan Fiber Optik dengan Distribusi Fiber Optik Menuju OPD / Dinas, koneksi terpusat pada Switch distribusi yang dikoneksikan menggunakan Fiber Optik. Topologi jalur kabel fiber Optik sebagai jalur distribusi jaringan belum menyesuaikan kebijakan penataan ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2010-2030. Namun kedepannya Dinas Komunikasi dan Informatika berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten Gresik akan melakukan kajian/analisa Penyusunan Rencana Pemasangan Jalur Kabel Fiber Optik OPD maupun kelurahan yang diidentifikasi berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik 2010-2030 sebagaimana disampaikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomer 8 Tahun 2011.

3.5.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, yang mampu memberikan rekomendasi

pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada arah kebijakan, rencana dan program pembangunan.

Pembangunan yang berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi kini dan generasi masa depan (UU No. 32/2009).

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik memiliki kontribusi mengampuh indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagai berikut :

- a. Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan (1 indikator);
- b. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi (3 indikator);
- c. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan (2 indikator);
- d. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan (4 indikator).

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota tim Pokja III Pembuatan KLHS-RPJMD, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik terkait dengan Pembangunan Ekonomi, melalui publikasi isu strategis pemerintah Kabupaten Gresik dan upaya penanganannya. Selain itu tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik adalah meningkatkan *awareness* masyarakat, khususnya terkait isu strategis penanggulangan kemiskinan, dimana salah satu indikatornya adalah *stunting*. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain, mengupdate isi website gresikkab.go.id, membuat flyer edukasi, aktif dalam pemberitaan media sosial pemerintahan (youtube, IG, Facebook dan twitter).

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikannya pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga

perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu-isu strategis dapat dideskripsikan sebagai berikut :

a. Implementasi SPBE

Implementasi SPBE di Kabupaten Gresik berkembang cukup signifikan, oleh karena itu perlu terus dikembangkan di berbagai aspek yang mendorong tercapainya efektifitas dan efisiensi kinerja dan pelayanan publik yang mencakup antara lain : Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Layanan Berbasis Elektronik, infrastruktur, aplikasi dan kelembagaan pada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Gresik. Aplikasi-aplikasi di seluruh OPD belum semuanya terintegrasi. Kebijakan SPBE belum mengikuti peraturan perundangan dan perkembangan teknologi, dalam hal Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE juga belum semuanya diterapkan berdasarkan kebijakan SPBE. Masih banyak layanan Pemkab Gresik yang belum berbasis elektronik dan berjalan sendiri-sendiri (belum terpadu). Sangatlah *urgent* untuk dilakukan pengintegrasian sistem-sistem aplikasi yang ada di seluruh perangkat daerah, sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas dalam kinerja dan pelayanan publik, serta memperkecil kerentanan ekosistem IT. Tetap dikembangkannya infrastruktur TIK terutama jaringan TIK berbasis FO (*Fiber Optic*) sehingga dapat diwujudkan kecepatan pelayanan jaringan, sehingga kinerja OPD-OPD dan fungsi pelayanan publik dapat maksimal dan tetap dikembangkannya *Gresik Smart City*.

Maka diperlukan suatu upaya yang dapat meningkatkan pemanfaatan seluruh usaha penerapan teknologi dapat mengimbangi besarnya sumber daya yang telah dicurahkan. Diperlukan sebuah sistem yang dalam bahasa teknis memiliki tingkat skalabilitas yang tidak terbatas, bukan hanya usaha visualisasi dari data yang ada, melainkan penyusunan solusi lengkap yang dapat menjadi platform akuisisi data sampai diseminasinya, pengolah Big-Data hingga analisisnya, serta menjadi ruang digital kolaboratif bagi seluruh Perangkat Daerah hingga Pemimpin Daerah untuk dapat benar-benar memanfaatkan data dalam tindakan-tindakan pemerintahan.

Platform yang dibutuhkan harus mampu menjadi jembatan dari seluruh proses bisnis sehingga memungkinkan penggunanya untuk melakukan cross-tabulation untuk menemukan relasi dari multivariable dari berbagai sumber data terstruktur maupun tidak terstruktur. Platform yang sama juga harus memanfaatkan penggunaan teknologi informasi geografis sehingga data pemerintahan dapat

dilihat secara holistik untuk mendukung keputusan yang tepat guna. Pemerintah Kabupaten Gresik juga berharap dengan penyederhanaan tata kelola data ini dapat memberikan wawasan potensi penguatan PAD.

b. Data Center/Ruang Server

Dengan perkembangan teknologi digital 4.0 yang sangat pesat saat ini masyarakat dituntut untuk bergerak lebih cepat, praktis, efisien dan cenderung instan, sehingga Pemerintahan Kabupaten Gresik harus bergerak cepat, praktis, dan efisien. Kabupaten Gresik menjadi salah satu kabupaten di Indonesia dengan perubahan yang pesat, artinya sangat dibutuhkan tempat-tempat yang mempunyai fasilitas dengan kelengkapan sistem teknologi digital yang berstandar 4.0.

Sejalan dengan kebutuhan tersebut, Ruang Server Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik yang menjadi pusat penyimpanan informasi, aplikasi dan data dirasa memerlukan pembaruan mengingat kebutuhan data yang semakin meningkat dan menampung perangkat Teknologi Informasi yang semakin banyak. Dengan pembaruan serta peningkatan kapasitas dan standarisasi ruang server, diharapkan tingkat availability-nya naik, server dan network uptime meningkat, serta perangkat-perangkat yang ada di dalamnya dapat termitigasi dengan baik apabila terjadi insiden atau kejadian yang tidak diharapkan demi tercapainya Arsitektur SPBE Nasional yang terpadu dan terintegrasi. Langkah awal yang harus dilakukan untuk mencapainya adalah dengan tersedianya Data center yang terstandarisasi dengan tingkat availability, uptime server, dan perangkat jaringan yang memadai

c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia di bidang pengelolaan IT

Keterbukaan dan kecepatan penyampaian informasi kepada masyarakat serta pemenuhan penyelenggaraan SPBE perlu diimbangi dengan kemampuan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan berkualitas di bidang IT dengan mengikuti pelatihan-pelatihan sesuai bidangnya.

d. Keamanan Informasi

Di Kabupaten Gresik sedang gencar-gencarnya melakukan penerapan manajemen keamanan informasi secara optimal melalui penyusunan tata kelola keamanan informasi untuk meningkatkan nilai Indeks Keamanan Informasi. Regulasi tentang keamanan informasi masih belum mengikuti peraturan perundangan dan perkembangan teknologi sehingga perlu disusun secara

bertahap dan menyelaraskan dengan penerapan manajemennya. Selain itu perlu dilakukan juga pembinaan kepada masyarakat khususnya terkait pengetahuan dan teknologi keamanan informasi. Peningkatan kapasitas SDM dilakukan dengan cara berkoordinasi ke Dinas Kominfo Provinsi atau dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Penerapan keamanan informasi di Kabupaten Gresik akah lebih optimal jika didukung dengan anggaran yang memadai.

e. Satu Data Kabupaten

Data memegang peranan strategis dalam transformasi digital sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan sehingga pimpinan dapat mengambil keputusan dan kebijakan secara tepat. Koordinasi pengelolaan data melalui forum Satu Data perlu lebih digaungkan lagi ke seluruh pemangku kepentingan. Beberapa kendala dalam mewujudkan satu data antara :

- Kesiapan infrastruktur dan manajemen data yang belum memadai
- Belum dilakukannya integrasi data dan masih terdapat permasalahan egosektoral yang memungkinkan tersedianya data yang berbeda antar instansi.
- Munculnya keraguan antar instansi untuk berbagi akses data
- Kurangnya SDM yang mampu mengelola data dengan baik
- Terdapat beragam referensi dan standar data
- Pemahaman kebijakan Satu Data belum dipahami secara merata.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK

4.1. Visi dan Misi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Gresik untuk periode Review RPJMD 2021-2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, perlu dirumuskan misi yang menjelaskan ruang lingkup prioritas dalam melaksanakan kegiatannya. Hal ini dimaksudkan agar arah setiap program dan kegiatan menjadi jelas dan dapat menciptakan keadaan yang membuat kehidupan masyarakat berlangsung efektif serta memiliki peran penting untuk memberikan pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026, Tugas dan Fungsi Diskominfo termasuk dalam **Misi ke-1** yaitu *“Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel serta mewujudkan Kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif”*. Dalam rangka pencapaian misi pertama di atas maka ditetapkan **Tujuan ke-1** yaitu *“Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance”* diukur dengan indikator indeks Reformasi Birokrasi. Tujuan ke-1 tersebut dijabarkan dalam sasaran pembangunan **Sasaran ke-1** sebagai berikut : *“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Akuntabel dengan Pelayanan Publik yang Berkualitas Berbasis Pemanfaatan Teknologi Informasi”* dengan indikator kinerja yang diampuh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah *Indeks Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik*

4.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik

Untuk mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan bahwa tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik adalah : *“Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi”*. dengan Indikator : *Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*.

Sasaran strategis Dinas merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi yang lebih optimal dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan perubahan terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja yang merumuskan dari 3 (tiga) sasaran 17 (tujuh belas) indicator kinerja menjadi 5 (lima) Sasaran Strategis kedalam 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang kemudian dilanjutkan kedalam Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan.

Berdasarkan rumusan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai di dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Yang disediakan
2. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI)
3. Meningkatkan Tingkat Kematangan kapabilitas proses SPBE
4. Meningkatkan Data Statistik Sektoral yang disediakan
5. Meningkatkan keamanan sistem elektronik

Adapun Tujuan dan sasaran jangka menengah pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Strategis 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA/RENSTRA						
TUJUAN	SASARAN IKU	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET		
				2024	2025	2026
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi Indikator kinerja : Indeks SPBE	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	Persentase ketersediaan sistem administrasi perkantoran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%
	1. Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Yang disediakan	1. Persentase Pengaduan Pelayanan Publik Daerah yang diselesaikan	92,1%	92,2%	92,3%	92,4%
		2. Jumlah informasi dan dokumentasi publik yang disediakan	121 informasi	131 informasi	141 informasi	151 informasi
		3. Jumlah Konten Positif Pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan	1800 konten	1810 konten	1820 konten	1830 konten
	2. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI)	1. Persentase Ketersediaan Layanan Pusat Data	75% (6.570 jam dari 8.760 jam)	80% (7.008 jam dari 8.760 jam)	85% (7.446 jam dari 8.760 jam)	90% (7.884 jam dari 8.760 jam)
	3. Meningkatnya Tingkat Kematangan kapabilitas proses SPBE	1. Persentase pelaksanaan kebijakan SPBE yang dievaluasi	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase aplikasi yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	75%	75%	75%	75%
	4. Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang disediakan	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan data yang disediakan	0	4 rekom	4 rekom	4 rekom
	5. Meningkatnya keamanan sistem elektronik	1. Jumlah Aplikasi yang sudah menerapkan keamanan informasi	18	30	40	58

Tabel 4.2
Capaian Tujuan dan Sasaran
sebelum Perubahan Rencana Strategis 2021-2026

TUJUAN (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR SASARAN (4)	(2021) (5)	(2022) (6)	(2023)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI), keamanan sistem elektronik, dan data terintegrasi	Persentase perangkat daerah dan kelurahan yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah	97% (46 OPD dan 26 kelurahan)	97% (46 OPD dan 26 kelurahan)	
		Tingkat kematangan layanan pusat data	2	2	
		Tingkat kematangan layanan jaringan intra instansi pusat/ pemerintah daerah	2	2	
		Tingkat kematangan penggunaan sistem penghubung layanan	2	3	
		Tingkat kematangan penerapan manajemen aset TIK	1	1	
		Tingkat kematangan penerapan manajemen data	1	3	
		Tingkat kematangan layanan data terbuka	2	3	
		Tingkat kematangan penerapan manajemen keamanan informasi	1	2	
	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI)	Persentase perangkat daerah yang terlayani infrastruktur TI			97.22% (70 OPD / 72 OPD)
	Meningkatnya tingkat kematangan kapabilitas proses SPBE	Tingkat kematangan pelaksanaan tim koordinasi SPBE	4	4	4
		Tingkat kematangan kolaborasi penerapan SPBE	3	3	
		Tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE	1	2	3
		Tingkat kematangan penerapan manajemen layanan SPBE	1	2	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	(2021)	(2022)	(2023)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	Meningkatnya informasi pemerintahan dan data statistik sektoral yang dipublikasikan	Pertumbuhan pengunjung website	5% ~ 445309 dari 424104 viewers	5% ~ 467575 dari 445309 viewers	
		Pertumbuhan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan yang dipublikasikan	5% ~ 2541 informasi dari 2.420 informasi	5% ~ 2668 informasi dari 2541 informasi	
		Tingkat kematangan layanan pengaduan pelayanan publik	4	4	
		Persentase data statistik sektoral yang dipublikasikan	100% ~ 100 / 100 data	100% ~ 105 / 105 data	
		Persentase data sektoral (layanan perangkat daerah) yang diintegrasikan	28.57% (2/7 data)	42.86% (3/7 data)	
	Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang Disediakan	Pertumbuhan Analisa Data Sektoral yang disediakan			4 analisa (100%) ~ 8 dari 4 analisa data sektoral
	Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Yang disediakan	Pertumbuhan Informasi Publik Pemerintah Daerah yang disediakan			46%~ 73 dari 50 informasi
		Pertumbuhan konten edukasi yang dipublikasikan			9%~ 1150 dari 1056 konten edukasi
		Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik			5
	Meningkatnya keamanan sistem elektronik	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi			3

Pada dokumen RPJMD Kabupaten Gresik, Diskominfo mendukung Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian dengan tujuan dan indikator sasaran yang selaras dengan Review RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 sebagaimana berikut :

Tabel 4.3

Keselarasan Visi, Misi, Sasaran dan Indikator Sasaran

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

MISI KE - 1 Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntable serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif				Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026
TUJUAN-1 Menghadirkan tata kelola pemerintahan Gresik Baru yang inovatif, kolaboratif dan cerdas berdasarkan <i>good and clean governance</i>				
SASARAN KE - 1 Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Penanggung Jawab	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi Indikator kinerja : Indeks SPBE	1. Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Yang disediakan	1. Persentase Pengaduan Pelayanan Publik Daerah yang diselesaikan	Bidang Statistik dan Informasi Publik	
		2. Jumlah informasi dan dokumentasi publik yang disediakan		
		3. Jumlah Konten Positif Pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan		
	2. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI)	4. Tingkat Ketersediaan Layanan Pusat Data	Bidang Teknologi Informatika	
	3. Meningkatnya tingkat kematangan kapabilitas proses SPBE	5. Persentase pelaksanaan kebijakan SPBE yang dievaluasi	Bidang SPBE	
		6. Persentase aplikasi yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah		

	4. Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang disediakan	7. Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang disediakan	Bidang Statistik dan Informasi Publik
	5. Meningkatnya keamanan sistem elektronik	8. Jumlah Aplikasi yang sudah menerapkan keamanan informasi	Bidang Teknologi Informatika

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi yang memuat cara-cara dalam mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan.

Strategi dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus diselesaikan selama 5 tahun ke depan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkungan pembangunan sektor Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik di Kabupaten Gresik.

Tabel 4.4
Penyelarasan Arah Kebijakan dan Strategi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

MISI KE - 1 Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntable serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif				RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026
TUJUAN - 1 Menghadirkan tata kelola pemerintahan Gresik Baru yang inovatif, kolaboratif dan cerdas berdasarkan <i>good and clean governance</i>				
SASARAN KE - 1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi				
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Urusan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	1. Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Yang disediakan	Penanganan dan pengelolaan layanan pengaduan LaporSP4N sampai tingkat RT	‘- Fasilitasi dan koordinasi menyalurkan pengaduan masuk kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang. - monitoring dan evaluasi pengelolaan pengaduan kepada seluruh Unit Kerja penyelenggara pelayan publik dengan melibatkan APIP sebagai pengawas internal	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
		Keterbukaan informasi public pemerintah Kabupaten Gresik kepada masyarakat secara transparans	‘- Fasilitasi permohonan informasi dan dokumentasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) - pengelolaan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi public	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
	2. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI)	Penambahan Kapasitas Bandwith	Melakukan pengecekan rutin terhadap IP lokal untuk memastikan kabel terhubung, melakukan setting ulang atau reset perangkat, melakukan monitoring bandwidth secara rutin	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
		Pengamanan jaringan dan data	Memperkecil kerentanan ekosistem IT	

		diperlukan router cadangan dan penganggaran terhadap router yang rusak, pembelian duct kabel, serta menganggarkan pemeliharaan rutin jaringan LAN di semua OPD, kecamatan dan kelurahan	Melakukan pengecekan jaringan LAN di beberapa OPD, melakukan perbaikan peralatan jaringan di beberapa OPD	
		Melakukan Monitoring Basis data di tiap OPD, Melakukan Pengembangan data warehouse dengan pengaplikasian SiMantra Builder	SOP Integrasi Database Dengan Application Programming Interface (API) Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Akses Integrasi Database Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), SOP Integrasi Link Website / Sistem Informasi Layanan Publik Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melakukan koordinasi dengan OPD terkait integrasi Data	
		Membuat program dan kegiatan untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang TIK	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola IT sampai tingkat operator di lingkungan pemerintahan dengan cara Fasilitasi dan Pendampingan	
3. Meningkatnya tingkat kematangan kapabilitas proses SPBE		Pengembangan secara maksimal dan optimal dalam implementasi SPBE	efisiensi dan efektifitas dalam kinerja dan pelayanan publik dalam bidang IT antara lain mencakup Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Layanan Berbasis Elektronik, infrastruktur, aplikasi dan kelembagaan pada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Gresik	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
		Pengembangan secara maksimal dan optimal dalam implementasi SPBE	pengintegrasian sistem-sistem aplikasi yang ada di seluruh perangkat daerah	

	4. Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang disediakan	Pembuatan sistem integrasi antar OPD dalam layanan satu data dan data sektoral	Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait integrasi sistem	Urusan pemerintahan bidang statistik
		Menyusun SK Tim terkait pengelolaan Satu Data Kabupaten untuk menetapkan nama operator data yang berperan dalam data tiap OPD	Melakukan koordinasi dengan OPD terkait penentuan nama-nama yang bertanggung jawab terhadap informasi/pengisian data	
	5. Meningkatnya keamanan sistem elektronik	penerapan manajemen keamanan informasi secara optimal melalui penyusunan tata kelola keamanan informasi untuk meningkatkan nilai Indeks Keamanan Informasi	Menyusun regulasi tentang keamanan informasi berdasarkan peraturan perundangan dan perkembangan teknologi	Urusan pemerintahan bidang persandian

BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK

**5.1. Rencana Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kabupaten Gresik**

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta kerangka pendanaan pada Perubahan Renstra tahun 2021–2026 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.1

Review Matriks Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

Row				Nama Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang penanggung jawab	Keterangan
X				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30	31
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (3 URUSAN)					15.031.626.000		23.242.184.835		22.838.165.000		27.231.587.000		35.046.826.000		40.772.625.000		
2	16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					14.654.224.000		22.421.930.835		21.777.667.000		25.656.693.000		32.496.190.000		36.324.570.000		
2	16	2	16	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
2	16	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Realisasi Sasaran Program/Target Sasaran Program	84,76%	100%	7.868.302.000	100%	7.710.464.835	100%	7.913.799.000	100%	9.332.022.000	100%	10.127.221.000	100%	11.410.806.000	Sekretariat	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen/laporan perencanaan dan pelaporan		14 Dokum en	38.151.770	13 Dokum en	17.972.000	13 Dokum en	25.741.000	13 Dokum en	49.000.000	13 Dokum en	59.175.000	13 Dokum en	80.323.600	Sekretariat	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Peserta Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan		90 orang	35.841.000	60 orang	15.651.000										
					Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokum en		1 Dokum en											
16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat						2 Dokum en	19.741.000								
16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat								1 Dokum en	29.000.000	1 Dokum en	35.000.000	1 Dokum en	50.323.600		

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Row				Nama Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang penanggung jawab	Keterangan
X				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30	31
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LKJIP, LPPD, SAKIP, Laporan Movev Kegiatan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LKJIP, LPPD, SAKIP, Laporan Movev Kegiatan)		12 Dokumen	2.310.770	12 Dokumen	2.321.000										
16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	6.000.000										
16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	24.175.000	12 Laporan	30.000.000				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan		3 sub kegiatan	3.600.042.000	3 sub kegiatan	3.855.846.200	3 sub kegiatan	4.314.700.000	3 sub kegiatan	5.039.491.820	3 sub kegiatan	5.476.497.142	3 sub kegiatan	5.605.266.856		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN DISKOMINFO	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN DISKOMINFO dalam 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	3.592.142.000	1 Tahun 1 Tahun	3.851.356.200										
16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 orang/12 bulan	4.308.650.000										
16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 orang/12 bulan	5.026.491.820	34 orang/12 bulan	5.459.255.102	34 orang/12 bulan	5.585.180.612						

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Row				Nama Urusan/Bidang Daerah/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang penanggung jawab	Keterangan
X				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30	31
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD dalam 1 Tahun	1 Jenis	1 Jenis	2.200.000	1 Jenis	1.220.000										
16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil						1 laporan	2.206.000								
16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil								1 laporan	6.500.000	1 laporan	8.321.020	1 laporan	9.543.122		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran perangkat daerah dalam 1 tahun	3 Jenis	3 Jenis	5.700.000	3 Jenis	3.270.000										
16	1	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi						12 laporan	3.844.000								
16	1	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi								12 laporan	6.500.000	12 laporan	8.921.020	12 laporan	10.543.122		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Jumlah administrasi Kepegawaian perangkat daerah dalam 1 tahun		2 sub kegiatan	3.000.000.000	2 sub kegiatan	3.000.000.000	2 sub kegiatan	1.500.000.000	2 sub kegiatan	275.000.000	2 sub kegiatan	360.000.000	2 sub kegiatan	462.000.000		
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan yang disediakan		64 stel	-	70 stel	-										

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Row				Nama Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang penanggung jawab	Keterangan
X				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30	31
16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan							-								
16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan							-	1 Paket	65.000.000	1 Paket	70.000.000	1 Paket	95.000.000		
16	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-		-			-								
16	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-		-			-	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	275.000.000	1 dokumen	350.000.000		
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Cukai kepada masyarakat	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Cukai kepada masyarakat		8 kali	3.000.000.000	8 kali	3.000.000.000										
16	1	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						200 Orang	1.500.000.000								
16	1	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								50 orang	10.000.000	50 orang	15.000.000	50 orang	17.000.000		

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Row				Nama Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang penanggun g jawab	Keterangan
X				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun		7 sub kegiata n	245.884.014	7 sub kegiatan	112.110.000	7 sub kegiatan	773.867.500	7 sub kegiatan	1.075.627.700	7 sub kegiata n	1.221.244.820	7 sub kegiatan	1.555.425.131		31
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bahan Alat Listrik Jumlah Media Converter	Jumlah bahan alat listrik yang disediakan, jumlah media converter yang disediakan		8 jenis (battera y A3, battera y kotak, battera y a2, kabel antena tv dan cctv, kabel roll 25	3.999.574	8 jenis (batteray A3, batteray kotak, batteray a2, kabel roll 25 meter, kabel roll 15 meter,	1.510.000										
XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1 Paket	17.500.000								
XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan								1Paket	25.250.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	33.292.900		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Pendingin Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Bahan Komputer Jumlah Komputer dan Peralatan Komputer	Jumlah alat pendingin yang disediakan, jumlah alat tulis kantor yang disediakan, jumlah bahan komputer yang disediakan, jumlah komputer dan peralatan komputer yang disediakan		1 jenis (ac = 3), 37 jenis (atk), 4 jenis (bahan komput er), 4 jenis (peralat an	179.942.537	1 jenis (ac = 3), 37 jenis (atk), 4 jenis (bahan komput er), 4 jenis (peralata n	60.000.000										
16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			-		-	6 Paket	397.113.000								

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Row				Nama Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang penanggung jawab	Keterangan
X				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30	31
16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			-		-			6 Paket	482.697.750	6 Paket	545.284.610	6 Paket	720.176.000		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bahan Dan Peralatan pembersih	Jumlah Bahan dan alat pembersih yang disediakan		23 jenis : - 6 buah alat pel, 5 buah	6.941.970	23 jenis : - 7 buah alat pel, 8 buah cairan	4.000.000										
16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						1 Paket	16.353.500								
16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan								1 Paket	25.988.850	1 Paket	29.000.000	1 Paket	33.000.000		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan		9 dos air botol, 301 galon,,	20.463.078	9 dos air botol, 301 galon,,	18.000.000										
16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						1 Paket	60.000.000								
16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan								1 Paket	93.500.000	1 Paket	122.550.000	1 Paket	169.205.000		

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Row				Nama Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang penanggung jawab	Keterangan
X				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30	31
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Banner Jumlah Barang cetakan dan Penggandaan Jumlah jasa Publikasi Ucapan	Jumlah banner yang dicetak, jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan, jumlah publikasi ucapan		12 kali cetak spanduk/banner, 415 lembar	20.514.355	12 kali cetak spanduk/banner, 450 lembar	12.600.000										
16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						2 Paket	90.000.000								
16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan								2 Paket	122.000.000	2 Paket	147.000.000	2 Paket	177.000.000		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan		4 jenis bahan bacaan	2.022.500	4 jenis bahan bacaan	2.000.000										
16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						4 Dokumen	10.000.000								
16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan								4 Dokumen	15.000.000	4 Dokumen	16.100.000	4 Dokumen	19.310.000		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah fasilitas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang disediakan		2 jenis (luar daerah, dalam daerah)	12.000.000	2 jenis (luar daerah, dalam daerah)	14.000.000										
16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2 Laporan Dalam Daerah dan Luar	182.901.000								

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Row				Nama Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang penanggung jawab	Keterangan
X				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30	31
16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								2 Laporan Dalam Daerah dan Luar	311.191.100	2 Laporan Dalam Daerah dan Luar	331.310.210	2 Laporan Dalam Daerah dan Luar	403.441.231		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2 sub kegiatan	3.537.000	2 sub kegiatan	2.500.000	2 sub kegiatan	71.293.000	2 sub kegiatan	1.355.422.300	2 sub kegiatan	1.241.264.530	2 sub kegiatan	1.544.890.983		
16	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	-										
16	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	-			3 unit (2 roda empat dan 1 roda dua)	950.000.000	2 unit	750.000.000	2 unit	850.000.000		
				Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel/Kursi	Jumlah mebel (meja, kursi, almari) yang disediakan		2 jenis (kursi plastik, kursi sekreta	3.537.000	8 buah kursi kerja, 8 buah meja	2.500.000										
16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						15 Unit	71.293.000								
16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan								15 Unit	175.422.300	20 Unit	266.264.530	25 Unit	324.890.983		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah ruangan kantor yang diberikan sekat antar meja/vertikal blind/kaca film/rak almari	jumlah ruangan kantor yang diberikan sekat antar meja/vertikal blind/kaca film/rak		1 paket	-	1 paket	-										
16	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								-							

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Row				Nama Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang penanggung jawab	Keterangan
X				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30	31
16	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							-	1 unit	230.000.000	1 unit	225.000.000	1 unit	370.000.000		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun		3 jasa	825.393.596	3 jasa	702.036.635	3 jasa	784.243.680	3 jasa	912.480.180	3 jasa	1.044.039.508	3 jasa	1.183.404.288		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Operasional Bulanan	Jumlah operasional bulanan yang disediakan		5 jenis (belanja tagihan telepon, belanja, belanja	282.684.288	5 jenis (belanja tagihan telepon, belanja tagihan air,	183.000.000										
16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	218.543.600										
16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								5 Laporan	259.529.853	5 Laporan	322.574.149	5 Laporan	384.611.000		
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara		3 jenis (pemeliharaan peralatan dan	42.909.308	3 jenis (pemeliharaan peralatan dan	18.636.635										
16	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	62.900.080										

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Row				Nama Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang penanggung jawab	Keterangan
X				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30	31
16	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								3 Laporan	90.150.327	3 Laporan	128.665.359	3 Laporan	175.993.288		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Non Strata Satu Jumlah Tenaga Administrasi Strata Satu Jumlah Tenaga Keamanan Jumlah Tenaga Kebersihan yang ada	Jumlah Tenaga Administrasi Non Strata Satu, Tenaga Administrasi Strata Satu, Tenaga Keamanan, Tenaga Kebersihan yang ada		6 orang, 9 orang, 3 orang, 1 orang	499.800.000	4 orang, 11 orang, 3 orang, 1 orang	500.400.000										
16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				19 Laporan	502.800.000										
16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						19 Laporan	562.800.000	19 Laporan	592.800.000	19 Laporan	622.800.000				
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah		2 jenis	155.293.620	2 jenis	20.000.000	2 jenis	443.953.820	2 jenis	625.000.000	2 jenis	725.000.000	2 jenis	979.495.142		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		6 kendaraan	45.393.620	6 kendaraan	20.000.000										
16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	193.868.000										

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Row				Nama Urusan/Bidang Daerah/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang penanggung jawab	Keterangan
X				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30	31
16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya								7 Unit	250.000.000	7 Unit	305.000.000	7 Unit	350.000.000		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara		1 paket	109.900.000	1 paket	-										
16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	250.085.820										
16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								1 Unit	375.000.000	1 Unit	420.000.000	1 Unit	629.495.142		
2	16	2		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1. Presentase pengaduan layanan publik yang difasilitasi	Jumlah Pengaduan Yang Difasilitasi (diteruskan, didisposisi, dijawab) Dibagi Jumlah Pengaduan yang masuk X 100%	90,54% (287/317)	100%	1.510.865.000	100%	5.261.496.000	100%	3.873.913.000	100%	2.871.171.000	100%	3.659.639.000	100%	4.730.433.000	Bidang Statistik dan Informasi Publik	
					2. Presentase jenis informasi publik penyelenggaraan pemerintah yang dipublikasi	Jumlah jenis informasi publik yang dipublikasi dibagi total jenis informasi publik x 100%	0%	100% (3/3)		100% (3/3)		100% (3/3)		100% (3/3)		100% (3/3)		100% (3/3)			
					3. Persentase permintaan data yang difasilitasi PPID	Jumlah permintaan data yang difasilitasi PPID dibagi jumlah permintaan data x 100%	100% (3/3)	100%		100%		100%		100%		100%		100%			

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Row				Nama Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang penanggung jawab	Keterangan
X				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30	31
2	16	2	201	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah panggilan kedaruratan yg difasilitasi	Jumlah panggilan kedaruratan yg difasilitasi	192	211	1.510.865.000	232	5.261.496.000	255	3.873.913.000							Bidang Statistik dan Informasi	
					- Jumlah Konten penyelenggaraan pemerintahan yang Di Publikasikan melalui media	Jumlah Konten penyelenggaraan pemerintahan yang Di Publikasikan melalui media	2420	2541		2668											
					- Jumlah Media yang dimanfaatkan untuk publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah Media yang dimanfaatkan untuk publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan	5 media	7 media		8 media											
					- Jumlah Pengaduan yang masuk dan difasilitasi	Jumlah Pengaduan yang masuk dan difasilitasi	317	333		350											
					- Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina	0	0		2											
					- persentase Pengaduan yang ditanggapi tepat waktu	Jumlah pengaduan yang ditanggapi tepat waktu dibagi Jumlah Pengaduan yang masuk x 100%	100%					100%									
					- persentase permohonan informasi publik yang dicukupi	Jumlah permohonan informasi publik yang dicukupi dibagi jumlah permintaan data x 100%	100%					100%									
					- Jumlah informasi publik Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	Jumlah informasi publik Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	25 informasi publik					25 informasi publik									
					- Jumlah informasi penyelenggaraan pemerintahan yang dipublikasikan	Jumlah informasi penyelenggaraan pemerintahan yang dipublikasikan	2541 informasi					2668 informasi								Bidang Statistik dan Informasi	
					- Jumlah lembaga komunikasi publik yang digunakan untuk penyebarluasan edukasi	Jumlah lembaga komunikasi publik yang digunakan untuk penyebarluasan edukasi	0					23 lembaga									

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Row				Nama Urusan/Bidang Daerah/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang penanggung g jawab	Keterangan
X				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30	31
					1. Persentase panggilan kedaruratan yg ditindaklanjuti	jumlah panggilan darurat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah panggilan yang masuk x 100%	482/482 (100%)							100%	2.871.171.000	100%	3.659.639.000	100%	4.730.433.000	dilakukan perubahan indikator karena : - sesuai Permen PANRB No. 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, dimana dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026, nilai indeks SPBE menjadi salah satu indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Gresik. - Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan cascading dengan cara mengambil tingkat kematangan indikator SPBE sebagai indikator kinerja utama. Hal ini menyulitkan dalam melakukan pengukuran berkala (bulanan atau triwulanan) karena tingkat kematangan hanya bisa diukur oleh kementerian PANRB yang hasilnya keluar pada awal tahun berikutnya - Indikator kinerja perangkat daerah seharusnya dinilai oleh Kepala Daerah, bukan Kementerian - sesuai Permen PANRB No. 89 Tahun 2021 dijelaskan bahwa indikator harus memenuhi kriteria SMART, bersifat Spesifik (tidak bias) dan Measurable (memiliki ukuran kuantitatif) sedangkan tingkat kematangan merupakan ukuran kualitatif	
					2. Persentase OPD yang menindaklanjuti pengaduan tepat waktu	jumlah OPD yang menindaklanjuti pengaduan tepat waktu dibagi jumlah OPD yang menerima laporan pengaduan x 100%	95,5%							95,6%		95,7%		95,8%			
					3. Jumlah OPD yang menyediakan Daftar informasi dan dokumentasi publik	Jumlah OPD yang menyediakan Daftar informasi dan dokumentasi publik	5							7		9		11			
					4. Jumlah konten informasi pemerintah yang dipublikasikan	Jumlah konten informasi pemerintah yang dipublikasikan (konten sosialisasi, edukasi dan berita didalamnya termasuk konten hak anak)	2000							2005		2010		2015			
				Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	Jumlah rapat koordinasi fasilitasi PPID		0	3	-	6	178.131.000									Bidang Statistik dan	
					Jumlah rapat koordinasi fasilitasi pengaduan di aplikasi lapor.go.id			3		12											
					jumlah pelatihan penggunaan aplikasi lapor.go.id			1		2											
					jumlah Sosialisasi terkait informasi publik oleh PPID lingkup OPD			1		2											
					jumlah Sosialisasi dan pelatihan terkait Informasi publik oleh PPID lingkup Desa dan kelurahan																

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Infomasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Row				Nama Urusan/Bidang Daerah/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang penanggun g jawab	Keterangan
X				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30	31
16	02	2.01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik						1 dokume n	188.883.400								
16	02	2.01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik								1 dokumen	170.000.000	1 dokume n	227.000.000	1 dokume n	335.000.000		
				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah pemeliharaan website gresikkab.go.id			1	271.559.737	1	348.715.700										
					Jumlah pemeliharaan website SiDesa					1											
					Jumlah pemeliharaan website siklip					1											
					Jumlah pemeliharaan website PPID					1											
					Jumlah lisensi flipping					1											
					Jumlah rapat koordinasi update data penyelenggaraan pemerintahan dengan OPD			3		4											
					jumlah koordinasi kegiatan OPD yang dipublikasikan			3		48											
					Jumlah lisensi cpanel tahunan		1	1		1											
					jumlah web hosting OPD yang di kelola			20		25											
					Jumlah Pembelian PC untuk desain grafis					2											
16	02	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik						1 dokume n	459.270.700								

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Infomasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Row				Nama Urusan/Bidang Daerah/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang penanggun g jawab	Keterangan
X				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30	31
16	02	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik								1 dokumen	190.000.000	1 dokume n	283.000.000	1 dokume n	355.000.000		
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pembuatan Perda Radio suara Gresik				617.705.263	1	734.956.700										
					Jumlah Koordinasi dengan Balmon dan pusat terkait perijinan Radio					3											
					Jumlah Iuran tahunan frekuensi radio					1											
					Jumlah sewa internet (Mbps)		10	10		10											
					Jumlah Tenaga Penyiar yang di rekrut		4	5		6											
					Jumlah Tenaga teknis radio			0		1											
					Jumlah Tenaga konten kreatif untuk sosial media					2											
					Jumlah Tenaga konten kreatif untuk video					1											
					jumlah lisensi lagu yang dibeli		300	300		350											
					Jumlah lisensi radiohock					1											
					Jumlah lisensi Adobe Audition					2											
					jumlah pemeliharaan pemancar radio FM			1		1											
					jumlah Pemeliharaan peralatan streaming			1		1											
					jumlah reportase yang dilakukan			132		240											
					jumlah domain dan hosting suaragresik.id			1		1											
					jumlah penayangan di media televisi					2											
					Jumlah rapat monitoring dan evaluasi crew radio			44		48											
					Jumlah rapat monitoring dan evaluasi media					12											
					Jumlah PC untuk streaming dan siaran yang di beli																

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Row				Nama Urusan/Bidang Daerah/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang penanggung jawab	Keterangan
X				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30	31
16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik						1 dokume n	751.611.800								
16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik								1 dokumen	650.000.000	1 dokume n	810.000.000	1 dokume n	1.050.000.000		
16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik			-		-	1 dokume n	318.920.000								
16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik			-		-			1 dokumen	215.000.000	1 dokume n	280.000.000	1 dokume n	315.000.000		
16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media			-		-	1 layanan	605.256.000								
16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media			-		-			1 layanan	400.000.000	1 layanan	529.639.000	1 layanan	750.000.000		
				Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Tenaga Call Taker dan dispatch yang di rekrut		9	9	621.600.000	12	3.701.370.400,00										
					jumlah tenaga sound dan multi media center					2											
					Jumlah sewa aplikasi kedaruratan call 112		1	1		1											
					Jumlah sewa Backup internet (Mbps)		3	0		50											
					Jumlah peralatan audio visual media center																
					Jumlah Pembangunan media Centre					1											
					Jumlah aplikasi pendukung media center																
					Operasional media center 24 jam x 7 hari																

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Row				Nama Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang penanggun g jawab	Keterangan
X				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30	31
16	02	2.01	0009	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis						1 dokume n	777.440.000								
16	02	2.01	0009	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis								1 dokumen	700.000.000	1 dokume n	825.000.000	1 dokume n	950.433.000		
				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Jatim Kominfo Festival (JKF) yang diikuti oleh KIM				-	1	31.719.000										
					Jumlah pelatihan untuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)					4											
16	02	2.01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya						130 orang	237.624.100								
16	02	2.01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya								130 orang	171.171.000	130 orang	230.000.000	130 orang	325.000.000		
				penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah rekomendasi Branding Kabupaten Gresik	Jumlah rekomendasi Branding Kabupaten Gresik	0	5	0		266.603.200										
					Jumlah Kebijakan Branding Kabupaten Gresik	Jumlah Kebijakan Branding Kabupaten Gresik				2											

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Row				Nama Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang penanggung jawab	Keterangan
X				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30	31
16	02	2.01	0012	penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	0					1 dokumen	150.000.000								
16	02	2.01	0012	penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	0							1 dokumen	180.000.000	1 dokumen	240.000.000	1 dokumen	300.000.000		
16	02	2.01	0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah			-		-	3 unit	384.907.000								
16	02	2.01	0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah			-		-			3 unit	195.000.000	3 unit	235.000.000	3 unit	350.000.000		
2	16	3		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1. Presentase OPD yang Memanfaatkan Ruang Server	Jumlah OPD yang Memanfaatkan Ruang Server dibagi jumlah OPD di Kab. Gresik x 100%	25% (12 OPD / 48 OPD)	25%	4.493.758.120	25%	8.094.186.000	25%	8.603.565.000	27%	11.886.638.000	29%	16.645.408.000	31%	17.791.030.000		
					2. Persentase OPD yang Menerapkan Manajemen Aset TIK	Jumlah OPD yang Menerapkan Manajemen Aset TIK dibagi jumlah OPD (47) x 100%	0%	0%		2%		25%		50%		75%		100%			
					3. Persentase OPD yang Menggunakan Sistem Penghubung Layanan	Jumlah OPD yang Menggunakan Sistem Penghubung Layanan dibagi jumlah OPD x 100%	0%	0%		2%		25%		50%		75%		100%			
					4. Persentase OPD yang Menerapkan Manajemen Data	Jumlah OPD yang Menerapkan Manajemen Data dibagi jumlah OPD x 100%	0%	0%		2%		25%		50%		75%		100%			

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Row				Nama Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang penanggung jawab	Keterangan
X				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30	31
2	16	3	2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	- Kapasitas Bandwith Internet untuk perkantoran pemerintahan - Jumlah OPD kelurahan, kecamatan dan OPD yang terlayani jaringan intranet	Kapasitas Bandwith Internet untuk perkantoran pemerintahan	300 mbps	500 mbps	4.314.439.724	1 Gbps	4.498.764.787	1,6 Gbps	7.273.703.026							Bidang Teknologi Informatika	
					- jumlah pemeliharaan jaringan intra		1	1		1											
					- jumlah pemeliharaan jaringan Fiber Optik		1	1		1											
					- jumlah pemeliharaan jalur CCTV			1		1											
					1. Jumlah OPD yang dibina untuk menerapkan manajemen Aset TIK	Jumlah OPD yang dibina untuk menerapkan manajemen Aset TIK	0					5 PD		10 PD	7.144.004.203	15 PD	9.898.577.633	20 PD	10.568.276.715		
					2. Persentase Ketersediaan Layanan Jaringan Intra Pemerintah	Jumlah Jam yang tersedia layanan Jaringan Intra Pemerintah yang aktif dibagi total jam dalam 1 tahun	7.709 jam (88% dari 8.760 jam)						7.884 jam (90% dari 8.760 jam)		8.052 jam (92% dari 8.760 jam)		8.234 jam (94% dari 8.760 jam)			Bidang Teknologi Informatika	
				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kapasitas Bandwith Internet untuk perkantoran pemerintahan		300 mbps	500 mbps	4.314.439.724	1 Gbps	4.498.764.787										
					Jumlah Kelurahan, Kecamatan Dan OPD Yang		46 OPD	46 OPD dan 26 kelurah		46 OPD dan 26 keluraha											
					Jumlah metro untuk mendukung jaringan			44		44											
					Jumlah tenaga ahli jaringan yang di rekrut		1	1		1											
					jumlah server clustering yang			4													
					Jumlah iuran As number (tahunan)		1	1		1											
					jumlah pemeliharaan jaringan intra		1	1		1											
					jumlah pemeliharaan jaringan Fiber Optik		1	1		1											
					jumlah pemeliharaan jalur CCTV			1		1											
					rapat koordinasi terkait penggunaan jaringan			2		3											

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Row				Nama Urusan/Bidang Daerah/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang penanggung jawab	Keterangan
X				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30	31
					jumlah perjalanan dinas pengecekan troubleshooting jaringan			12		24											
16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah						1 Unit	7.273.703.026								
16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah								1 Unit	7.144.004.203	1 Unit	9.898.577.633	1 Unit	10.568.276.715	Bidang Teknologi Informatika	
2	16	03	2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	- Jumlah server backup yang di adakan	Jumlah server backup yang di adakan	0	2	179.318.396	1	3.595.421.213		1.329.861.974		4.742.633.797		6.746.830.367		7.222.753.285		
					- Jumlah UPS yang diadakan	Jumlah UPS yang diadakan	0	1		1											
					- Jumlah tenaga ahli programer yang di rekrut	Jumlah tenaga ahli programer yang di rekrut	0	1		1											
					- Kapasitas server clustering	Kapasitas server clustering	CPU : 132 ; Memory : 16GB	CPU : 192 ; Memory : 32GB													
					- Kapasitas server backup data	Kapasitas server backup data		12 TB		20 TB											
					- Kapasitas Backup Listrik (UPS)	Jumlah Kapasitas Backup Listrik(UPS)	1kVA	2kVA		10kVA											
					- Manajemen Data Warehouse/Big Data	Jumlah Kelurahan,Kecamatan Dan OPD Yang Terlayani Jaringan				1 paket											
					- Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan	2			2											
					- Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan	2			3											
					- Jumlah OPD yang mengakses data dari Sistem Penghubung Layanan	Jumlah OPD yang mengakses data dari Sistem Penghubung Layanan	3			5											
					- Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 4.500.000.000	3			3											

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Infomasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Row					Nama Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang penanggun g jawab	Keterangan
X					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30	31
						1. Jumlah VPS yang dikelola	Jumlah VPS yang dikelola	165 VPS							180 VPS	4.742.633.797	195 VPS	6.746.830.367	210 VPS	7.222.753.285	Bidang Teknologi	
						2. Jumlah API yang dikelola	Jumlah API yang dikelola	14 API							18 API		22 API		26 API			
					Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah perencanaan Pembangunan media		1 paket	99.999.716	1 paket	3.514.204.731											
						Jumlah Pembangunan Ruang Server Baru				1 paket												
						Jumlah Pendeteksi suhu ruangan				1												
						Jumlah AC central				1												
						Jumlah server clustring yang di adakan				2												
						Jumlah server backup yang di adakan				1												
						Jumlah UPS yang diadakan				1												
						Jumlah listrik permium yang diadakan				1												
						Jumlah CCTV e-tilang																
						Jumlah rapat koordinasi terkait pemanfaatan ruang server oleh OPO		5		5												
16	03	2.02	0003		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				- 1 Unit	1.073.863.794										
16	03	2.02	0003		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola								- 1 Unit	4.592.000.000	- 1 Unit	6.408.101.500	- 1 Unit	6.869.550.288		
					Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan	Jumlah tenaga ahli programer yang di		0	1	79.318.680	1	81.216.482										
						Jumlah rapat koordinasi tentang			2		2											

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Row				Nama Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang penanggung jawab	Keterangan
X				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30	31
					Jumlah rapat monitoring database OPD			1		2											
					Jumlah sosialisasi arsitektur data dan informasi			1		1											
					Jumlah perjalanan dinas terkait layanan penghubung di OPD			10		10											
16	03	2.02	0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah						5 Layanan	255.998.180								
16	03	2.02	0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah								- 10 Layanan	150.633.797	- 12 Layanan	338.728.867	- 14 Layanan	353.202.997		
2	16	3		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1. Prosentase Dokumen Kebijakan yang dievaluasi	JUMLAH DOKUMEN KEBIJAKAN YANG DIEVALUASI / JUMLAH DOKUMEN SPBE YANG TERSEDIA	0% 100% (1 /1)	781.298.880	100% (3/3)	1.355.784.000	100% (3/3)	1.386.390.000	100% (3/3)	1.566.862.000	100% (3/3)	2.063.922.000	100% (3/3)	2.392.301.000			
					2. Persentase Indikator SPBE yang dievaluasi	Jumlah Indikator SPBE yang dievaluasi dibagi jumlah indikator	100% (37/37)	100% (47/47)		100% (47/47)		100% (47/47)	100% (47/47)		100% (47/47)		100% (47/47)				
					3. Persentase OPD yang Berkolaborasi dalam Penerapan SPBE	JUMLAH OPD YANG BERKOLABORASI / JUMLAH OPD X 100 %	0% 50%		75%		100%		100%		100%		100%				
					4. Persentase aplikasi yang dikembangkan dengan siklus pembangunan aplikasi	jumlah aplikasi yang dikembangkan dengan siklus pembangunan aplikasi dibagi total aplikasi yang dikembangkan dengan siklus	0% 0%		13% (2/15)		33% (5/15)		53% (8/15)		73% (11/15)		100% (15/15)				

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Row				Nama Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang penanggung jawab	Keterangan
X				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30	31
					5. Persentase OPD yang menerapkan Manajemen Layanan SPBE	JUMLAH OPD YANG MENERAPKAN MANAJEMEN LAYANAN SPBE /	0%	10%		20%		30%		50%		100%		100%		Bid. SPBE	
2	16	03	2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	- Jumlah Kebijakan SPBE yang dievaluasi	Jumlah Kebijakan SPBE yang dievaluasi	0	1	781.298.880	3	1.355.784.000		1.386.390.000								
					- Jumlah Indikator SPBE yang dievaluasi	Jumlah Indikator SPBE yang dievaluasi	47	47		47											
					- Jumlah OPD yang Berkolaborasi dalam Penerapan SPBE	Jumlah OPD yang Berkolaborasi dalam Penerapan SPBE	0	24		36											
					- jumlah aplikasi yang dikembangkan dengan siklus pembangunan aplikasi	jumlah aplikasi yang dikembangkan dengan siklus pembangunan	0	0		2											
					- Jumlah Opd yang menerapkan manajemen Layanan SPBE	Jumlah Opd yang menerapkan manajemen Layanan SPBE	0	2		4											
					- Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan	3			4											
					- Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan	2			3											
					1. Jumlah pedoman pelaksanaan SPBE yang disusun dan dievaluasi	Jumlah pedoman pelaksanaan SPBE yang disusun dan dievaluasi	2 pedoman					2 pedoman		2 pedoman	1.566.862.000	2 pedoman	2.063.922.000	2	2.392.301.000		

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Row				Nama Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang penanggung jawab	Keterangan
X				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30	31
					2. Jumlah Dokumen Perencanaan SPBE yang dievaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan SPBE yang dievaluasi	2 dokumen					2 pedoman		2 pedoman		2		2			
					3. Jumlah aplikasi yang difasilitasi pengembangannya menggunakan SDLC (Software Development Life Cycle)	Jumlah aplikasi yang difasilitasi pengembangannya menggunakan SDLC (Software Development Life Cycle)	2 aplikasi					5 aplikasi		8 aplikasi		11 aplikasi		15 aplikasi			
					4. Jumlah Indikator Evaluasi SPBE yang dipenuhi Data Dukung dan Narasinya	Jumlah Indikator Evaluasi SPBE yang dipenuhi Data Dukung dan Narasinya	47 indikator					47 indikator		47 indikator		47 indikator		47			
					5. Jumlah layanan yang dikelola melalui service desk	Jumlah layanan yang dikelola melalui service desk	31 layanan							31 layanan		33 layanan		35 layanan		Bid. SPBE	
				Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam	1. Jumlah Kebijakan SPBE yang dievaluasi	Dokumen	0	1	59.525.000	3	300.000.000										
					2. Jumlah Kebijakan SPBE yang disusun	Dokumen	0,5	1		0											
					3. Jumlah SOP SPBE yang disusun	Dokumen	0	0		2											
					4. Jumlah Rapat Koordinasi SPBE	Kali	1	3		4											
16	03	2.02	0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2 dokumen					2 dokumen	245.000.000								

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Row				Nama Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang penanggung jawab	Keterangan
X				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30	31
16	03	2.02	0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -	2 dokumen							2 dokumen	350.000.000	2 dokumen	450.000.000	2 dokumen	500.000.000		
				Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Jumlah FGD Penerapan Peta Rencana SPBE	Kali	0	6	129.404.000	6	200.000.000										
					2. Jumlah OPD yang difasilitasi dalam Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE	OPD	0	12		24											
16	03	2.02	0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	2 dokumen					2 dokumen	73.330.000								
16	03	2.02	0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi	2 dokumen							2 dokumen	125.000.000	2 dokumen	150.000.000	2 dokumen	200.000.000		
				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis	Jumlah Lisensi Office 365 yang disewa;	Lisensi	0	1 lisensi	399.703.380	2 lisensi	375.000.000										
					Jumlah Lisensi Zoom yang disewa;	Lisensi	0	4 lisensi		6 lisensi											
					Jumlah Aplikasi Gresikpedia yang disewa;	Bulan	0	11 Bulan		12 Bulan											
					Jumlah Tenaga Ahli Programmer yang direkrut;	Orang	0	1 orang		1 orang											
					Jumlah Portal Layanan Administrasi Pemerintahan yang dibangun/Sewa Aplikasi One Handling System	Paket	0	0		1 Paket											

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Row				Nama Urusan/Bidang Daerah/Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang penanggung jawab	Keterangan
X				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30	31
16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 unit					5 unit	484.390.000								
16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan	2 unit							8 unit	250.000.000	11 unit	363.922.000	15 unit	450.000.000		
				Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas	1. FGD Penerapan Smart City	Kali	0	7	148.250.000	7	250.000.000										
					2. Jumlah Rapat Evaluasi Smart City	Kali	0	2		3											
16	03	2.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart	3 dokumen					6 dokumen	367.500.000								
16	03	2.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart	3 dokumen							6 dokumen	450.000.000	6 dokumen	500.000.000	6 dokumen	542.301.000		
				Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi	Rapat OPD yang Berkolaborasi dalam Penerapan SPBE (4 x 48	OPD	0	0	44.416.500	48	230.784.000										
					Jasa konsultasi Pengelolaan Layanan SPBE	Paket	0	0		1											
					Pembangunan Single sign on	Paket	0	0		1											
					Pembangunan Aplikasi Helpdesk	Paket	0	0													
					Jumlah Pelatihan Manajemen jaringan		0	0	-	2 kali	-										
					Jumlah Pelatihan Manajemen data		0	0		2 kali											
					Jumlah Pelatihan Sistem Penghubung layanan		0	0		2 kali											

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Row				Nama Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang penanggung jawab	Keterangan
X				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30	31
16	03	2.02	0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah						1 dokumen	150.000.000								
16	03	2.02	0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber								1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	400.000.000		
16	03	2.02	0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	4 dokumen		-		-	4 dokumen	66.170.000								
16	03	2.02	0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	4 dokumen		-		-			4 dokumen	141.862.000	4 dokumen	250.000.000	4 dokumen	300.000.000	Bidang Statistik dan Informasi Publik	
2	20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					241.924.000		565.929.000		620.747.000		727.580.000		856.759.000		1.002.890.000		
2	16	2	20	URUSAN STATISTIK																	
2	20	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Analisa Data Sektoral yang disusun	Jumlah data sektoral lingkup OPD yang disusun dibagi jumlah OPD (30 OPD)	0% (2/30)	7%	241.924.000	13% (4/30)	565.929.000	20% (6/30)	620.747.000	27% (8/30)	727.580.000	33% (10/30)	856.759.000	33% (10/30)	1.002.890.000		
2	20	2	2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Data Sektoral lingkup OPD yang disusun	Jumlah Data Sektoral lingkup OPD yang disusun		2	241.924.000	4	565.929.000		620.747.000								

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Row					Nama Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang penanggun g jawab	Keterangan
X					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30	31
						- Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Satu Data	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Satu Data	3 kali					3 kali									
						- Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	Tingkat Kematangan berdasarkan Permenpanrb 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE : 1 : Informasi 2 : Interaksi	2					4									
						1. Jumlah OPD yang menyusun atau mengolah data secara terpisah gender	Jumlah OPD yang menyusun atau mengolah data secara terpisah gender	2 OPD					3 OPD		4 OPD	727.580.000	5 OPD	856.759.000	6OPD	1.002.890.000		
						Jumlah OPD yang mengumpulkan data statistik sektoral	Jumlah OPD yang mengumpulkan data statistik sektoral	25 PD						35 OPD		45 OPD		55 OPD				
						Jumlah Data Induk yang dikelola	Jumlah Data Induk yang dikelola	0 data							2 data		4 data		6 data			
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Cetakan ke dua Buku DDA / KDA yang diterbitkan BPS Kabupaten Gresik		0 29 buku	241.924.000	100	565.929.000,00											
						Jumlah rapat pembuatan Kebijakan satu data					6											
						Jumlah Sosialisasi tentang data sektoral OPD					1											
						Jumlah Sosialisasi tentang Wali data			1		1											
						Jumlah rapat koordinasi data stastik sektoral					4											
						Jumlah penyusunan data inflasi Kabupaten Gresik					1											

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Row				Nama Urusan/Bidang Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang penanggung jawab	Keterangan
X				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30	31
					Jumlah penyusunan data analisa bencana Balongpanggang Benjeng Cerme					1											
					Jumlah penyusunan data NTN dan NTP					1											
					Jumlah tenaga ahli analisis statistik yang di rekrut		1	1		1											
					Jumlah Verifikasi data kemiskinan																
20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,						1 dokumen	291.247.000								
20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis								1 dokumen	352.580.000	1 dokumen	375.000.000	1 dokumen	440.000.000		
				Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah OPD yang di beri pelatihan tentang data statistik sektoral		0	0		48											
20	02	2.01	0002	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang		0	0		0		37 orang	150.000.000								
20	02	2.01	0002	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang		0	0		0				37 orang	175.000.000	37 orang	225.000.000	37 orang	260.000.000		
20	02	2.01	0005	Pengembangan Infrastruktur Statistik	Jumlah Infrastruktur Statistik				-		-	2 unit	179.500.000								

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Row				Nama Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang penanggung jawab	Keterangan
X				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
20	02	2.01	0005	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Jumlah Infrastruktur Statistik			-		-			2 unit	200.000.000	2 unit	256.759.000	2 unit	302.890.000	Bidang Teknologi Informatika	
2	21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					135.478.000		254.325.000		439.751.000		847.314.000		1.693.877.000		3.445.165.000		
				URUSAN PERSANDIAN																	
2	21	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Prosentase Penanganan Serangan Cyber	Jumlah serangan cyber yang ditangani dibandingkan jumlah serangan cyber yang diterima	100% (7/7)	100%	135.478.000	100%	254.325.000	100%	439.751.000	100%	847.314.000	100%	1.693.877.000	100%	3.445.165.000		
2	21	2	2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase OPD yang Menerapkan Manajemen Keamanan Informasi	Jumlah OPD yang Menerapkan Manajemen Keamanan Informasi dibagi jumlah OPD	0	2% (1/47)	135.478.000	100% (47/47)	254.325.000	100% (47/47)	439.751.000								
					Jumlah OPD yang menerapkan manajemen keamanan informasi	Jumlah OPD yang menerapkan manajemen keamanan informasi	1 PD							6 PD	847.314.000	9 PD	1.693.877.000	12 PD	3.445.165.000		
				Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah OPD yang diberikan pelatihan tentang keamanan informasi		0	0	0	58	103.326.000										
21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						-1 Laporan	230.998.900								
21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								-1 Laporan	254.098.790	-1 Laporan	279.508.669	-1 Laporan	307.459.535		

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Row				Nama Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang penanggung jawab	Keterangan
X				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30	31
				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Bidang Teknologi dan Informatika)	Jumlah Firewall yang digunakan untuk keamanan jaringan		0	0	135.478.000	1	150.999.000										
					Jumlah Firewall yang digunakan untuk keamanan data		0	0		0											
					Jumlah Pengamanan yang digunakan untuk		1	1		1											
					Jumlah user Antivirus		0	25		50											
					Jumlah tenaga ahli untuk penanganan insiden keamanan yang di rekrut		0	1		2											
					Jumlah maintenance email gresikkab.go.id		0	0		1											
					Jumlah Sosialisasi arsitektur keamanan informasi		0	1		1											
					Jumlah Sosialisasi Digital Signature		0	1		1											
					Jumlah pelatihan penggunaan Digital Signature		0	1		4											
					Jumlah evaluasi penggunaan Digital Signature			1		1											
					Jumlah Perjalanan Dinas terkait penanganan keamanan informasi			17		20											

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

Row				Nama Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi Penghitungan	Baseline	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang penanggung jawab	Keterangan
X				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	27	28	29	30	31
					Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi																
21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						-1 Laporan	208.752.100								
21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi								-1 Laporan	593.215.210	-1 Laporan	1.414.368.331	-1 Laporan	3.137.705.465		
				Keterangan																	
				Urusan																	
				Program																	
				Kegiatan																	
				indikator kegiatan																	
				indikator kegiatan perubahan (Kemendagri 900.1)																	
				Sub Kegiatan renstra lama																	
				sub kegiatan dengan indikator baru sesuai kemendagri 050																	
				sub kegiatan dengan indikator baru sesuai kemendagri 900.1																	

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya. Indikator kinerja ini merupakan kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja.

Pada bab ini dijabarkan indikator kinerja Perangkat Daerah yang dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 terkait dengan komunikasi dan informatika diukur dengan indikator indeks SPBE. Perubahan terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja ini dilakukan dengan tujuan untuk lebih mengoptimalkan kinerja OPD sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik demi Kabupaten Gresik yang lebih maju.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026 ditampilkan dalam Tabel 6.1 berikut ini :

Tabel. 6.1
Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan Renstra dan Indikator Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Sasaran Renstra	Formulasi	Baseline	Target						Bidang	KETERANGAN	CATATAN
					2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Indeks SPBE (Indikator Sasaran di RPJMD)			tingkat kematangan penerapan SPBE dikelompokkan menjadi : Nilai 4,2 - 5,0 = Memuaskan Nilai 3,5 - < 4,2 = Sangat baik Nilai 2,6 - < 3,5 = Baik Nilai 1,8 - < 2,6 = Cukup Nilai < 1,8 = Kurang	2,55	3,01	3,19	3,65	3,86	4,03	4,13	Kabupaten		dilakukan perubahan indikator karena : '- sesuai Permen PANRB No. 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, dimana dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026, nilai indeks SPBE menjadi
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	Persentase ketersediaan sistem administrasi perkantoran dan Capaian Kinerja	jumlah sistem administrasi perkantoran dan Capaian Kinerja yang tercapai dibagi jumlah seluruh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat		

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kominfo Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi Indikator : Indeks SPBE		Perangkat Daerah	indikator kinerja dikali 100%										salah satu indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Gresik.
	Meningkatnya Informasi Pemerintahan dan Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan	-Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum	4	4	4							- Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan cascading dengan cara mengambil tingkat kematangan indikator SPBE sebagai indikator kinerja utama. Hal ini menyulitkan dalam melakukan pengukuran berkala (bulanan atau triwulanan) karena tingkat
		-Pertumbuhan pengunjung website	Jumlah pengunjung website pada Tahun (n) - Jumlah pengunjung website pada Tahun (n-1) Dibagi Jumlah pengunjung website pada Tahun (n-1) x 100%	424104 viewers	5% ~ 445309 dari 424104 viewers	5% ~ 467575 dari 445309 viewers							
		-Pertumbuhan informasi publik penyelenggaraan	Jumlah Informasi yang dipublish pada Tahun (n) - Jumlah Informasi yang dipublish pada Tahun (n-1) Dibagi	2.420 informasi	5% ~ 2541 informasi dari 2.420	5% ~ 2668 informasi dari 2541						Bidang Statistik dan Informasi Publik	LAMA

Perubahan Rencana Setrategis Dinas Kominfa Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

		pemerintah n yang dipublikasika n	Jumlah informasi yang dipublish pada Tahun (n-1) x 100%		inform asi	inform asi							kematangan hanya bisa diukur oleh kementerian PANRB yang hasilnya keluar pada awal tahun berikutnya - Indikator kinerja perangkat daerah seharusnya dinilai oleh Kepala Daerah, bukan Kementerian - sesuai Permen PANRB No. 89 Tahun 2021 dijelaskan bahwa indikator harus memenuhi kriteria SMART, bersifat Spesifik	
		-. Presentase Data Statistik Sektoral yang Dipublikasika n	Jumlah data statistik sektoral yang dipublikasikan Tahun n dibagi total data statistik sektoral (dengan target rencana peningkatan 5 % dari Tahun n-1)	95 data yang dipublika sikan	100% ~ 100 / 100 data	100% ~ 105 / 105 data								
		-. Persentase Data Sektoral (Layanan Perangkat Daerah) yang di Integrasikan	Jumlah Data Sektoral yang dintegrasikan dibagi Jumlah Seluruh Data Sektoral (7 data) x 100%	14.28% (1/7 data)	28.57 % (2/7 data)	42.86 % (3/7 data)								
	1. Meningkatny a Informasi dan Komunikasi Publik Pemeritah Daerah Yang disediakan	1. Pertumbuha n Informasi Publik Pemerintah Daerah yang disediakan	Jumlah Informasi Publik Pemerintah Daerah pada Tahun (n) - Jumlah Informasi Publik Pemerintah Daerah pada Tahun (n-1) Dibagi Jumlah Informasi Publik pada Tahun (n-1) x 100%	50 informas i			10% ~ 55 dari 50 infor masi					Bidang Statistik dan Informa si Publik	LAMA (Keme ndagri 050)	

Perubahan Rencana Setrategis Dinas Kominfo Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

		2. Pertumbuhan konten edukasi yang dipublikasikan	Jumlah konten edukasi (Berita, Talkshow, Live Streaming, Event Gresik, Siaran, Infografis) yang diisebarluaskan melalui kanal pemerintah daerah pada Tahun (n) - Jumlah konten edukasi Pemerintah Daerah pada Tahun (n-1) Dibagi Jumlah konten edukasi pada Tahun (n-1) x 100%	1056 konten edukasi			2% ~ 1077 dari 1056 konten edukasi						(tidak bias) dan Measurable (memiliki ukuran kuantitatif) sedangkan tingkat kematangan merupakan ukuran kualitatif
		3. Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum				5						
		1. Persentase Pengaduan Pelayanan Publik	jumlah pengaduan yang diselesaikan dibagi jumlah pengaduan yang masuk x 100%	92,1%				92,2 %	92,3%	92,4%	Bidang Statistik dan Informasi Publik	BARU (Kemendagri 900.1)	

Perubahan Rencana Setrategis Dinas Kominfa Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

		Daerah yang diselesaikan										
		2. Jumlah informasi dan dokumentasi publik yang disediakan	Jumlah informasi dan dokumentasi publik yang disediakan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)	121				131	141	151		
		3. Jumlah Konten Positif Pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan	Jumlah Konten Positif Pemerintah Kabupaten Gresik yang dipublikasikan melalui media (media sosial, media elektronik, media siber, media cetak)	1800				1810	1820	1830		
	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI), keamanan sistem elektronik,	- . Presentase perangkat daerah dan kelurahan yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah	Jumlah perangkat daerah dan kelurahan yang terhubung jaringan intra pemerintah dibagi jumlah total perangkat daerah dan kelurahan x 100%	62% (46 OPD)	97% (46 OPD dan 26 kelurahan)	97% (46 OPD dan 26 kelurahan)					Bidang Teknologi Informatika	LAMA

	dan data terintegrasi	- Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum	2	2	2						
		- Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum	2	2	2						
		- Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan	2	2	3					Bidang Teknologi Informatika	LAMA

			teratur 5. Optimum										
		- Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum	1	1	1							
		- Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum	1	1	3							

		- Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum	2	2	3						
		Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum	1	1	2	3	3	4	4		
	2. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi	1. Persentase perangkat daerah yang terlayani infrastruktur TI	Jumlah perangkat daerah yang terlayani infrastruktur TI dibagi Jumlah Seluruh OPD dan kelurahan x 100%	0%			25 %				Bidang Teknologi Informatika	LAMA (Kemendagri 050)

Perubahan Rencana Setrategis Dinas Kominfa Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

	Informatika (TI)	Persentase Ketersediaan Layanan Pusat Data	Jumlah Jam yang tersedia layanan pusat data yang aktif dibagi total jam dalam 1 tahun	75% (6.570 jam dari 8.760 jam)				80% (7.008 jam dari 8.760 jam)	85% (7.446 jam dari 8.760 jam)	90% (7.884 jam dari 8.760 jam)	Bidang Teknologi Informatika	BARU (Kemandagri 900.1)
3. Meningkatkan Tingkat Kematangan kapabilitas proses SPBE	- Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 6. Optimum	1	3	3						Bidang SPBE	LAMA
	- Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum	1	1	2							

Perubahan Rencana Setrategis Dinas Kominfa Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

	- Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum	4	4	4	5				Bidang SPBE	LAMA (Keme ndagri 050)
	- Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 7. Optimum	1	1	2	3					
	1. Persentase pelaksanaan kebijakan SPBE yang dievaluasi	Jumlah pelaksanaan kebijakan SPBE yang dievaluasi dibagi jumlah kebijakan SPBE x 100%	100%				100%	100%	100%		BARU (Keme ndagri 900.1)

Perubahan Rencana Setrategis Dinas Kominfa Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

		2. Persentase aplikasi yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	Jumlah aplikasi yang dimanfaatkan dibagi jumlah aplikasi yang dikembangkan berdasarkan siklus pembangunan aplikasi x 100%	75%				75%	75%	75%		
	4. Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang Disediakan	-. Pertumbuhan Analisa Data Sektoral yang disediakan	Jumlah Analisa Data Sektoral yang disediakan pada Tahun (n) - Jumlah Analisa Data Sektoral yang disediakan pada Tahun (n-1) Dibagi Jumlah Analisa Data Sektoral yang disediakan pada Tahun (n-1) x 100%	4 (tahun 2022)			2 analisa (50%) ~ 6 dari 4 analisa data sektoral				Bidang Statistik dan Informasi Publik	LAMA (Kemendagri 050)
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan data yang disediakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan data yang dihasilkan dari analisa data statistik sektoral	0				4 reko m	4 rekom	4 rekom		BARU (Kemendagri 900.1)

Perubahan Rencana Setrategis Dinas Kominfa Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

	5. Meningkatnya keamanan sistem elektronik	1. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	Penentuan tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval : 1. Rintisan 2. Terkelola 3. Terdefinisi 4. Terpadu dan teratur 5. Optimum	1	1	2	3				Bidang Teknologi Informatika	LAMA (Kemendagri 050)
		Jumlah Aplikasi yang sudah menerapkan keamanan informasi	Jumlah Aplikasi yang sudah dilakukan pengujian keamanan	18				30	40	58	Bidang Teknologi Informatika	BARU (Kemendagri 900.1)

Keterangan :

 sasaran & indikator Renstra Program penunjang urusan pemerintahan

 sasaran & indikator Renstra lama tahun 2021 - 2026

 sasaran & indikator Renstra perubahan tahun 2021 - 2026 (Kemendagri 050)

 sasaran & indikator Renstra perubahan tahun 2021 - 2026 (Kemendagri 900.1)

BAB VII

P E N U T U P

Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik. Perubahan Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kabupaten Gresik yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 merupakan kesatuan gerak dan langkah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik yang mengedepankan nilai-nilai profesional, partisipatif dan berkualitas sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien dan efektif guna menjamin eksistensi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik saat ini dan di masa mendatang.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman dan melandasi untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahunan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya "*Good Governance*".

